

TEORI EKONOMI CAKTI



International Research
and Development for Human Belings



Teori Ekonomi Kemanusiaan Modern

“Strategi Percepatan Ekonomi Negara dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Secara Material dan Spiritual serta Mencegah Kemiskinan, Pengangguran, Terorisme, dan Korupsi Berbasis *Integrated Online* antar Desa hingga Pemerintah Pusat”

Penemu Teori:
CAKTI INDRA GUNAWAN, SE., MM., PhD

TEORI EKONOMI CAKTI

Teori Ekonomi Kemanusiaan Modern



Diterbitkan Oleh :

CV. IRDH (Research & Publishing) Anggota IKAPI
Office : - Jl. A Yani Gg. Sokajaya 59 Purwokerto
- Perum New Villa Bukit Sengkaling
Blok C9 No. 1 Malang
HP. 082227031919 WA. 089621424412
www.irdhresearch.com
email: irdhresearch@gmail.com



website: www.irdhbook.com dan email: admin@irdhbook.com

**TEORI EKONOMI CAKTI (TEC) :
TEORI EKONOMI KEMANUSIAAN MODERN
“Strategi Percepatan Ekonomi Negara dan Peningkatan Kualitas
Sumberdaya Manusia Secara Material dan Spiritual serta
Mencegah Kemiskinan, Pengangguran, Terorisme dan Korupsi
Berdasarkan *Integrated Online* Antar Desa hingga Pemerintah Pusat”**

CAKTI INDRA GUNAWAN, SE., MM., Ph.D

**International Research and Development for Human Beings
Malang
2017**

TEORI EKONOMI CAKTI (TEC) :
TEORI EKONOMI KEMANUSIAAN MODERN
“Strategi Percepatan Ekonomi Negara dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Secara Material dan Spiritual serta Mencegah Kemiskinan, Pengangguran, Terorisme dan Korupsi Berbasis *Integrated Online* Antar Desa hingga Pemerintah Pusat”

Penulis : Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D
ISBN : 978-602-6672-00-1
Editor : Lukito Hari Purwanto, SS
Cover & Layout : Rina Purnawati

Edisi Pertama,
Cetakan Pertama, April 2017
Jumlah Halaman, xi + 83; 18,2 X 25, 7 cm

Diterbitkan oleh:



CV. IRDH (Research & Publishing)
Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017
Office: Jl. A Yani Gg. Sokajaya 59 Purwokerto
New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang
HP. 082227031919 WA. 089621424412
www.irdhresearch.com email: irdhresearch@gmail.com
www.irdhbook.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan segala karunia dan ilmu kepada penemu Teori Ekonomi Cakti (TEC): Teori Ekonomi Kemanusiaan Modern; Tanpa Kekuasaan Allah Yang Maha Agung dan Maha Perkasa, tidak mungkin tercipta TEC ini. Pertama kali, ucapan terima kasih yang tidak pernah habis hingga ajal menjemput kepada Ibunda Sri Rejeki dan Ayahanda Mino yang telah mendoakan siang dan malam serta dorongan yang terbaik kepada penemu TEC. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar Mino, Marsiyo Kartomartejo dan Karso Prawiro yang telah memberikan dorongan kepadapenemu TEC.

Teruntuk ananda Vega Raksa C. Cakti (Aksa) yang dengan segenap kesabaran, do'a dan dukungan penuh kepada penemu TEC, Ayah ucapkan banyak terima kasih dan semoga menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Kepada seluruh guru mulai guru Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi, penemu TEC ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa para guru, tidaklah mungkin TEC ini tercipta untuk kemaslahatan umat manusia. Khusus untuk pembimbing skripsi, thesis dan disertasi yaitu Alm. Prof. HMS Idrus, SE., MEc., PhD (Universitas Brawijaya) dan Prof Amarjit Kaur FASSA serta Zifirdaus Adnan, BA., MA., PhD (The University of New England, Australia), sungguh penemu TEC bersimpuh dan mengucapkan terima kasih yang tiada henti-hentinya atas ilmu yang diberikan.

Kepada seluruh rekan dosen, peneliti dan penulis baik di Indonesia maupun di luar negeri, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan kepada penemu TEC. Khusus untuk mahasiswa-mahasiswi strata satu, strata dua dan strata tiga, penemu TEC mengucapkan terima kasih, tanpa kalian TEC ini tidak akan dapat teralisasi publikasinya di seluruh dunia.

Penemu TEC juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, yang telah, sedang dan akan mendukung TEC ini, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.

Semoga “secuil” ilmu dalam TEC ini dapat bermanfaat untuk perkembangan dunia ilmu pengetahuan di era globalisasi pada abad XXI dan bertahan untuk abad- abad mendatang hingga akhir zaman. Dan semoga TEC dapat bermanfaat untuk strategi percepatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) serta mencegah kemiskinan, pengangguran, terorisme, separatism, korupsi dan

kriminalitas berbasiskan *online report* setiap warga dan aparaturnegara yang terkoneksi dari desa hingga pusat pemerintahan.

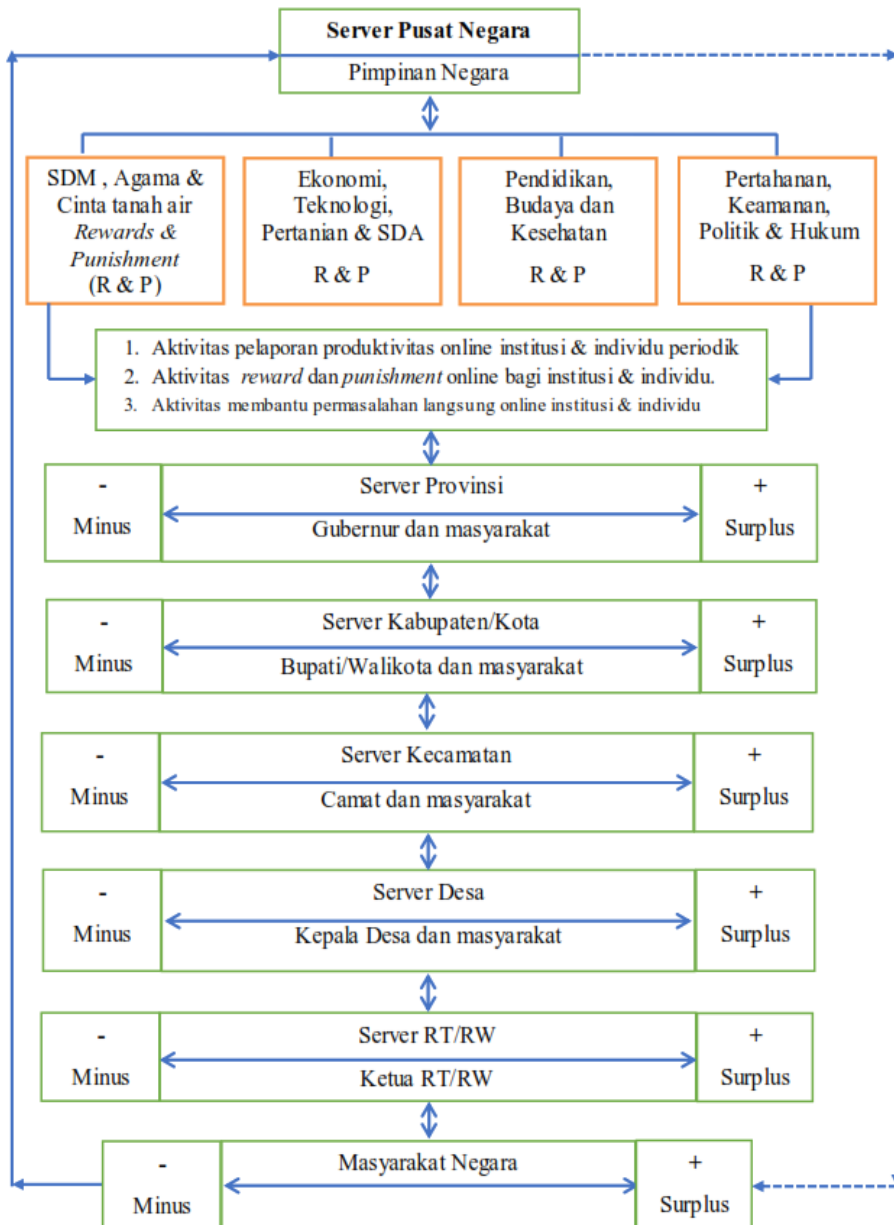
Semoga Tuhan Maha Cahaya dan penuh Kasih Sayang serta Maha Pengampun, senantiasa memberikan cahaya kelembutan kepada para pemimpin negara di seluruh dunia untuk mengambil kemanfaatan TEC apabila dirasa berguna untuk membangun negara besar dalam arti sebenarnya yaitu makmur secara ekonomi dan bahagia secara batin bagi masyarakat di negaranya masing- masing serta mampu mencegah kehancuran peradaban umat manusia akibat keserakahan dan ketamakan ekonomi manusia.

Malang, 10 Februari 2017
Penemu TEC,

Cakti Indra Gunawan, PhD

TEORI EKONOMI CAKTI (TEC): TEORI EKONOMI KEMANUSIAAN MODERN

**“Strategi Percepatan Ekonomi Negara dan Peningkatan Kualitas
Sumberdaya Manusia Secara Material dan Spiritual serta Mencegah
Kemiskinan, Pengangguran, Terorisme dan Korupsi Berbasis *Integrated
Online* Antar Desa hingga Pemerintah Pusat”**



ABSTRAK
TEORI EKONOMI CAKTI (TEC): TEORI EKONOMI
KEMANUSIAAN MODERN

**“Strategi Percepatan Ekonomi Negara dan Peningkatan Kualitas
Sumberdaya Manusia Secara Material dan Spiritual serta
Mencegah Kemiskinan, Pengangguran, Terorisme & Korupsi
Berbasis *Integrated Online* Antar Desa hingga Pemerintah Pusat”**

Ditemukan oleh:
Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D
**(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
dan Direktur International Research and Development for Human Beings,
Alumni S1, S2 FEB Universitas Brawijaya dan S3 The University of
New England, Australia)**

Alamat: Jl. Sokajaya 59 Purwokerto Jawa Tengah
No HP: 085749547500 WA: 089621424412
email: cakti.gunawan@gmail.com

Teori Ekonomi Cakti (untuk selanjutnya disingkat dengan TEC) adalah sebuah teori ekonomi kemanusiaan modern yang bertujuan untuk strategi mempercepat ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara material dan spiritual di sebuah negara serta upaya mencegah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan korupsi berdasarkan *Integrated Online Report* antar desa yang kemudian diteruskan ke kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan terpusat di ibukota negara sebagai pusat komando.

Selanjutnya, TEC memiliki 5 (lima) pilar utama indikator keberhasilan dalam operasionalnya di sebuah negara yaitu: 1) Indikator adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pengetahuan/teknologi dan pengamalan kongkrit nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sebuah negara untuk membantu keluarga dan sesama serta memperjuangkan negaranya (cintai tanah air) setiap saat. 2) Indikator adanya peningkatan ekonomi, kemakmuran negara dan masyarakat setiap hari secara merata tanpa monopoli oleh pihak tertentu berdasarkan teknologi tingkat tinggi (*high technology*) serta pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara benar oleh negara dan pengembangan potensi lainnya di bidang pertanian,

peternakan, perikanan, industri, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), pariwisata, perpajakan, ekspor dan impor serta potensi ekonomi lainnya yang hanya ditujukan untuk kepentingan rakyat di tiap desa baik di pelosok maupun perkotaan. 3) Indikator adanya peningkatan kualitas sektor pendidikan secara keilmuan dan terapan berbasiskan kualitas nilai spiritual setiap hari dengan minimal masyarakatnya berpendidikan sarjana strata dua (master) yang biayanya 100% ditanggung oleh negara dan peningkatan kualitas jati diri bangsa melalui pengembangan budaya, adat istiadat serta mengedepankan pelayanan profesional gratis kesehatan masyarakatnya di tiap titik desa tanpa dipungut biaya sedikitpun. 4) Indikator adanya peningkatan kualitas pertahanan semesta rakyat, keamanan terpadu *online*, kondisi politik yang hanya ditunjukkan untuk kepentingan negara bukan kelompoknya serta penegakkan hukum *online* secara tegas tanpa tebang pilih untuk mencegah korupsi, narkoba, terorisme, separatisme dan kriminalitas. 5) Pemaksaan sistem *Reward* dan *punishment online* setiap hari dan dijalankan untuk jangka sangat panjang sepanjang sejarah negara itu ada di muka bumi, yang langsung dapat diterima dan diberikan oleh siapapun tanpa pandang bulu sekalipun pemimpin negara maupun rakyat jelata yang paling miskin di negaranya. Sehingga percepatan dan pelaksanaan 5 (lima) pilar TEC dapat berjalan dengan sangat cepat, sistematis dan terukur serta berdampak sangat kuat untuk melahirkan sebuah negara *super power* dalam arti yang sebenarnya yaitu sebuah negara yang kaya secara ekonomi dan spiritual, damai, penuh rahmat bagi masyarakatnya dan memberikan sumbangsih besar bagi pencegahan keruntuhan peradaban umat manusia di muka bumi pada era globalisasi dan pasar bebas ini akibat perang, terorisme dan persaingan pasar global antar bangsa.

Adapun visi TEC adalah “Sebuah teori percepatan yang diproyeksikan untuk membangun sistem ekonomi manajemen di sebuah negara yang kuat secara material dan spiritual berbasiskan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat yang terkoneksi laporan produktivitas kerja dan pemberian *reward* dan *punishment*. Pemberian *reward* dan *punishment* dilakukan secara online mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga pemerintahan pusat negara. Sebagai konsekuensinya, dampaknya dapat memberikan *multiplier effects* terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pencegahan terorisme, separatismen dan korupsi. Di samping itu, TEC akan berimbas terhadap penguatan spiritual dan empati kepada penderitaan keluarga dan tetangga di lingkungan sekitar dan masyarakat

lainnya di dalam dan luar negeri tanpa membedakan latarbelakang agama, suku, budaya golongan dan strata sosial.

Sedangkan misi TEC yaitu: 1) Menyediakan infrastruktur *online report* dari tingkat Rukun Tetangga (RT) yang ada di setiap desa hingga pemerintah pusat dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi produktivitas kerja dan pengamalan nilai-nilai agama/kepercayaan dan nilai luhur bangsa sehingga akan meningkatkan toleransi dan empati yang tinggi terhadap keluarga, tetangga di lingkungan masyarakat. Rasa mencintai tanah air dan membela negara juga kewajiban yang harus dilaporkan kepada negara secara rutin setiap bulan. 2) Menyediakan infrastruktur *online report* program peningkatan percepatan ekonomi desa yang berdampak terhadap kemakmuran masyarakat desa dan negara secara merata dan meningkatkan penguasaan teknologi serta pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan potensi lainnya misalnya pertanian, peternakan, perikanan, industri, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), pariwisata, perpajakan, ekspor dan impor serta potensi SDA lainnya. Bagi desa yang surplus secara ekonomi dapat memberikan bantuan kepada desa yang masih minus. Bagi desa yang surplus diberikan *reward*, sedangkan *punishment* diberikan kepada desa yang lambat perkembangan ekonominya. 3) Menyediakan infrastruktur *online report* program peningkatan kualitas sektor pendidikan secara material maupun spiritual untuk masyarakat minimal sarjana strata dua dan peningkatan kualitas jati diri bangsa melalui pengembangan secara intensif bagi generasi muda untuk melestarikan budaya dan adat istiadat. Faktor kesehatan juga merupakan faktor yang penting yang harus disediakan sarana setiap RT atau minimal desa. Tokoh pendidikan, tokoh adat sangat dibutuhkan untuk pelestarian budaya dan ciri khas sebuah bangsa. *Reward* dan *punishment* juga diberikan kepada desa dan semua unsur masyarakat yang kuat dalam merealisasikan optimasi pendidikan, budaya dan kesehatan. 4) Menyediakan program *online report* peningkatan kualitas pertahanan, keamanan, kondisi politik yang kondusif serta penegakkan hukum baik di bidang pencegahan korupsi, narkoba dan penurunan tingkat kriminalitas di masyarakat. Melalui pendidikan bela negara dan pendidikan politik serta hukum bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan kekuatan yang efektif untuk mencegah terorisme dan muatan negatif lainnya. 5) Menyediakan infrastruktur *online report* sistem *reward* dan *punishment* yang jelas, transparan melalui *software* sistem TEC yang ada di masing-masing server pelaporan TEC tingkat desa hingga pemerintah pusat. Di samping itu, setiap masyarakat harus

memiliki (diberi oleh negara) perangkat *handphone*, laptop atau media apa saja yang dapat terhubung dengan sistem *online*. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat dilakukan pada saat itu juga seorang warga negara atau aparatur pemerintah melakukan produktivitas yang tinggi atau pelanggaran undang-undang dan peraturan negara.

Sistem TEC menggunakan jaringan *high advanced technology* yang dikelola secara resmi oleh negara di bawah naungan Undang-Undang Negara dengan satu komando terpusat di ibu kota negara sebagai puncak dari laporan *online* secara berkala (tiap bulan sekali). Laporan tiap bulan yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara yang berusia minimal 7 (tujuh) tahun dan form laporan sudah disediakan negara melalui sistem pada *handphone* (HP), komputer, laptop yang terhubung oleh server negara. Adapun isi laporan terdiri dari 5 (lima) pilar utama TEC yang telah disebutkan di atas.

Dalam prinsip TEC, teori ini mungkin bukan satu-satunya teori ekonomoi manajemen negara yang ada di muka bumi ini untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun penemu teori meyakini bahwa teori ini belum pernah ada dalam sejarah keilmuan umat manusia, khususnya di era globalisasi dan informasi serta persaingan pasar bebas di abad XXI. TEC hanya dapat dijalankan oleh kepala negara yang berani, otoriter dan berhati lembut serta memiliki komitmen kuat untuk mempercepat kesejahteraan negara dan masyarakat serta mengantarkan negaranya menjadi negara besar dan *super power* dalam arti sebenarnya yaitu negara yang makmur, bahagia lahir dan batin serta menekan terorisme, separatisme, kriminalitas, angka pengangguran, kemiskinan, korupsi dan tingkat kriminal setiap saat secara *online*.

Apabila jaringan internet dan teknologi di suatu negara belum memenuhi standar, maka TEC fleksibel dapat digunakan untuk wilayah propinsi terlebih dahulu yang sudah siap infrastruktur *online report* melalui jaringan internet. TEC bisa berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, selama negara dan masyarakatnya merealisasikan pilar-pilar TEC. Pemimpin negara dan pemimpin-pemimpin di seluruh pelosok negeri boleh berganti, namun TEC tetap dapat dijalankan selama negara memiliki komitmen yang kuat untuk hal tersebut. TEC sangat fleksibel dan dapat dijalankan oleh negara yang menganut sistem apapun juga baik liberalisme, kapitalisme, religiusisme, komunisme dan apapun pandangan politik setiap negara, selama negara tersebut memiliki kemauan kuat untuk mempercepat ekonomi dan peningkatan SDM sesuai dengan dasar-dasar dan haluan negara tersebut.

Apabila terjadi permasalahan dalam sistem *online* atau jaringan terputus atau ada gangguan lainnya dikarenakan kerusakan satelit atau kondisi terputus *online* lainnya, TEC tetap dapat dijalankan secara laporan manual setiap bulan. Adapun laporan dapat diserahkan kepada kepala desa dan diteruskan ke pemerintahan pusat. Lebih dari itu, TEC tidak pernah mengenal kasta, justru yang pemimpin yang di atas harus melayani masyarakat yang di bawah dan harus siap lelah, tidak mementingkan diri dan golongannya serta berdoa siang dan malam untuk membantu dan melayani masyarakatnya. Setiap pemimpin negara dan pemimpin wilayah serta aparatur negara adalah murni pelayan rakyat, dan bukan untuk mencari kekayaan dan kekuasaan secara dinasti.

Setiap warga negara dan aparatur pemerintah yang melanggar TEC berarti melawan negara, dan hal ini harus dibuat Undang-Undang Dasar Negara tersebut yang akan melaksanakan TEC. Selain itu, pahlawan bukanlah orang-orang yang ada di jajaran atas pemerintahan atau orang yang terkenal. Dalam TEC setiap warga negara walaupun itu petani, tukang sayur, siswa/mahasiswa sekalipun tetap pahlawan selama membantu sesama dan membela negara menurut kemampuannya baik secara fisik, material, doa dan *support* yang dapat dibuktikan dalam laporan *online* TEC.

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB I DEFINISI TEORI EKONOMI CAKTI (TEC)	
1.1. Definisi TEC	1
1.2. Visi dan Misi TEC	3
1.3. Ruang lingkup TEC	5
1.4. Proyeksi TEC	7
BAB II MEKANISMES TRUKTUR PEMERINTAHAN SISTONLINE	
2.1. Definisi Struktur Pemerintahan Sistem Online.....	9
2.2. Sistem Information Technology (IT) yang Dibutuhkan	10
2.3. Sistem Hukum yang Dibutuhkan	15
BAB III MEKANISME PEMERINTAH	
3.1. Pemerintah Pusat.....	17
3.2. Pemerintah Propinsi	20
3.3. Pemerintah Kabupaten/Kota	21
3.4. Pemerintah Kecamatan	22
3.5. Pemerintah Desa	23
BAB IV SISTEM OTORITER DALAM TEC	
4.1. Menetapkan Sistem Pemerintahan Otoriter Kerakyatan.....	24
4.2. Keunikan Sistem TEC.....	25
BAB V MEKANISME PEREKRUTAN SDM APARATUR PEMERINTAH DAN PILIHAN POLITIK SUATU NEGARA	
5.1. Mengangkat Personal di Struktur Pemerintahan di Wilayah Terkecil	27
5.2. Pilihan Politik Negara.....	29

BAB VI	MEKANISME SUBSIDI ANTAR DESA	
6.1.	Definisi Subsidi Antar Desa	31
6.2.	Otonomi Ekonomi Surplus Desa	32
6.3.	Manajemen Tranformasi Antar Desa	33
BAB VII	SISTEM PERTAHANAN DAN ANTI TERORISME	
7.1.	Definisi Sistem Pertahanan dan Anti Terorisme	35
7.2.	Mekanisme Sistem Pertahanan dan Anti Terorisme	35
7.3.	Alur Laporan Online	37
BAB VIII	SISTEM BUDAYA DAN ADAT	
8.1.	Sistem Budaya dan Adat	38
8.2.	Mekanisme Manajemen Adat dan Budaya	38
BAB IX	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	
9.1.	Defenisi Manajemen Masyarakat Beragama dan Berkepercayaan	41
9.2.	Mekanisme Pengelolaan Masyarakat Beragama dan Berkepercayaan	42
9.3.	Dampak Agama dan Kepercayaan	43
BAB X	MANAJEMEN PENDIDIKAN	
10.1.	Definisi Manajemen Pendidikan	44
10.2.	Mekanisme Manajemen Pendidikan	44
BAB XI	MANAJEMEN EKONOMI TERINTEGRASI SEMUA SISTEM	
11.1.	Definisi Manajemen terintegrasi	47
11.2.	Mekanisme Manajemen Terintegrasi	48
BAB XII	MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN INFORMASI	
12.1.	Definisi Manajemen Teknologi Informasi	51
12.2.	Mekanisme Manajemen Informasi dan Teknologi	51
12.3.	Penguatan Basis Informasi dan Teknologi	53
BAB XIII	KERJASAMA DENGAN NEGARA LAIN DAN WARGA INTERNASIONAL	
13.1.	Definisi Kerjasama Dengan Negara Lain dan Warga Internasional	54

13.2. Mekanisme Kerjasama Negara Lain dan Warga Internasional	54
BAB XIV MANAJEMEN SUMBERDAYA ALAM	
14.1. Definisi Manajemen Sumberdaya Alam dan Lainnya ..	56
14.2. Mekanisme Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA)	56
BAB XV MANAJEMEN KESEHATAN	
15.1. Definisi Manajemen Kesehatan	60
15.2. Mekanisme Manajemen Kesehatan	60
BAB XVI ANTISIPASI SISTEM ONLINE MENGALAMI KEMACETAN	
16.1. Definisi Antisipasi Online Mengalami Kemacetan	63
16.2. Mekanisme Antisipasi Sistem Online	63
BAB XVII PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	75
GLOSARIUM	82
INDEX	86
PROFIL PENULIS DAN PENEMU TEORI	89

BAB I

DEFINISI TEORI EKONOMI CAKTI (TEC)

1.1. Definisi dan Pilar indikator Keberhasilan TEC

Teori Ekonomi Cakti (untuk selanjutnya disingkat dengan TEC) adalah sebuah teori ekonomi kemanusiaan modern yang bertujuan untuk strategi mempercepat ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara material dan spiritual di sebuah negara serta upaya mencegah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan korupsi berbasis *Integrated Online Report* antar desa yang kemudian diteruskan ke kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan terpusat di ibukota negara sebagai pusat komando.

Selanjutnya, TEC memiliki 5 (lima) pilar utama indikator keberhasilan dalam operasionalnya di sebuah negara yaitu: 1) Indikator adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pengetahuan/teknologi dan pengamalan kongkrit nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sebuah negara untuk membantu keluarga dan sesama serta memperjuangkan negaranya (cintai tanah air) setiap saat. 2) Indikator adanya peningkatan ekonomi, kemakmuran negara dan masyarakat setiap hari secara merata tanpa monopoli oleh pihak tertentu berbasis teknologi tingkat tinggi (*high technology*) serta pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara benar oleh negara dan pengembangan potensi lainnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), pariwisata, perpajakan, ekspor dan impor serta potensi ekonomi lainnya yang hanya ditujukan untuk kepentingan rakyat di tiap

desa baik di pelosok maupun perkotaan. 3) Indikator adanya peningkatan kualitas sektor pendidikan secara keilmuan dan terapan berbasiskan kualitas nilai spiritual setiap hari dengan minimal masyarakatnya berpendidikan sarjana strata dua (master) yang biayanya 100% ditanggung oleh negara dan peningkatan kualitas jati diri bangsa melalui pengembangan budaya, adat istiadat serta mengedepankan pelayanan profesional gratis kesehatan masyarakatnya di tiap titik desa tanpa dipungut biaya sedikitpun. 4) Indikator adanya peningkatan kualitas pertahanan semesta rakyat, keamanan terpadu *online*, kondisi politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan negara bukan kelompoknya serta penegakan hukum *online* secara tegas tanpa tebang pilih untuk mencegah korupsi, narkoba, terorisme, separatisme dan kriminalitas. 5) Pemaksaan sistem *Reward* dan *punishment online* setiap hari dan dijalankan untuk jangka sangat panjang sepanjang sejarah negara itu ada di muka bumi, yang langsung dapat diterima dan diberikan oleh siapapun tanpa pandang bulu sekalipun pemimpin negara maupun rakyat jelata yang paling miskin di negaranya. Sehingga percepatan dan pelaksanaan lima pilar TEC dapat berjalan dengan sangat cepat, sistematis dan terukur serta berdampak sangat kuat untuk melahirkan sebuah negara *super power* dalam arti yang sebenarnya yaitu sebuah negara yang kaya secara ekonomi dan spiritual, damai, penuh rahmat bagi masyarakatnya dan memberikan sumbangsih besar bagi pencegahan keruntuhan peradaban umat manusia di muka bumi pada era globalisasi dan pasar bebas ini akibat perang, terorisme dan persaingan pasar global antar bangsa.

1.2. Visi Dan Misi TEC

Adapun visi TEC adalah “Sebuah teori percepatan yang diproyeksikan untuk membangun sistem ekonomi manajemen di sebuah negara yang kuat secara material dan spiritual berbasiskan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat yang terkoneksi laporan produktivitas kerja dan pemberian *reward* and *punishment*. Pemberian *reward* dan *punishment* dilakukan secara online mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga pemerintahan pusat negara. Sebagai konsekuensinya, dapat memberikan *multiplier effects* terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pencegahan terorisme, separatisme dan korupsi. Di samping itu, TEC akan berimbas terhadap penguatan spiritual dan empati kepada penderitaan keluarga dan tetangga di lingkungan sekitar dan masyarakat lainnya di dalam dan luar negeri tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya golongan dan strata sosial.

Sedangkan misi TEC yaitu: 1) Menyediakan infrastruktur *online report* dari tingkat Rukun Tetangga (RT) di sebuah desa hingga pemerintah pusat dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi produktivitas kerja dan pengamalan nilai-nilai agama/kepercayaan dan nilai luhur bangsa sehingga akan meningkatkan toleransi dan empati yang tinggi terhadap keluarga, tetangga di lingkungan masyarakat. Rasa mencintai tanah air dan membela negara juga kewajiban yang harus dilaporkan kepada negara secara rutin setiap bulan. 2) Menyediakan infrastruktur *online report* program peningkatan percepatan ekonomi desa yang berdampak terhadap kemakmuran masyarakat desa dan negara secara merata dan meningkatkan penguasaan teknologi serta pemanfaatan sumberdaya

alam (SDA) dan potensi lainnya misalnya pertanian, peternakan, perikanan, industri, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), pariwisata, perpajakan, ekspor dan impor serta potensi SDA lainnya. Bagi desa yang surplus secara ekonomi dapat memberikan bantuan kepada desa yang masih minus. Bagi desa yang surplus diberikan *reward*, sedangkan *punishment* diberikan kepada desa yang lambat perkembangan ekonominya. 3) Menyediakan infrastruktur *online report* program peningkatan kualitas sektor pendidikan secara material maupun spiritual untuk masyarakat minimal sarjana strata dua dan peningkatan kualitas jati diri bangsa melalui pengembangan secara intensif bagi generasi muda untuk melestarikan budaya dan adat istiadat. Faktor kesehatan juga merupakan faktor yang penting yang harus disediakan sarana setiap RT (Rukun Tetangga) atau minimal desa. Tokoh pendidikan, tokoh adat sangat dibutuhkan untuk pelestarian budaya dan ciri khas sebuah bangsa. *Reward* dan *punishment* juga diberikan kepada desa dan semua unsur masyarakat yang kuat dalam merealisasikan optimasi pendidikan, budaya dan kesehatan. 4) Menyediakan program *online report* peningkatan kualitas pertahanan, keamanan, kondisi politik yang kondusif serta penegakan hukum baik di bidang pencegahan korupsi, narkoba dan penurunan tingkat kriminalitas di masyarakat. Melalui pendidikan bela negara dan pendidikan politik serta hukum bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan kekuatan yang efektif untuk mencegah terorisme dan muatan negatif lainnya. 5) Menyediakan infrastruktur *online report* sistem *reward* dan *punishment* yang jelas, transparan melalui *software* sistem TEC yang ada di masing-masing *server* pelaporan TEC tingkat desa hingga pemerintah pusat. Di samping itu, setiap masyarakat harus memiliki (diberi oleh negara) perangkat

handphone (HP), laptop atau media apa saja yang dapat terhubung dengan sistem *online*. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat dilakukan pada saat itu juga seorang warga negara atau aparatur pemerintah melakukan produktivitas yang tinggi atau pelanggaran undang-undang dan peraturan negara.

1.3. Ruang Lingkup TEC

Ruang lingkup dalam TEC ini mengkhususkan pada pengembangan dan percepatan ekonomi secara serentak di sebuah negara, dengan sistem yang terkendali di pusat negara (ibu kota) dibantu oleh propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan tiap desa. Pola TEC mengikuti pola perkembangan dan komitmen sebuah negara yang menginginkan pertahanan ekonomi secara terpadu untuk mengikuti pola aliran globalisasi, tanpa harus mengorbankan dan menjual asset negara dan budaya serta SDM di tiap negara dalam konteks yang paling kecil yaitu desa. Sehingga persaingan globalisasi tetap masuk ke negara dengan berbagai aturan internasional, namun negara tersebut berhak dan berjuang untuk menahan dan memperkuat kompetensi negara nya.

Haluan sebuah negara tidak terbatas pada unsur isme ekonomi tertentu, misalnya liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan isme lainnya. Namun TEC memberikan sebuah terobosan membangun negara dalam arti total baik SDM-nya maupun negaranya yang bertumpu pada laporan transparan. Undang-Undang dan peraturan lainnya harus ditaati oleh warga negara dan juga seluruh unsur aparat pemerintah yang ingin agar pola pergerakan ekonomi negara tidak membebankan hutang negara dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan unsur berdikari secara ekonomi tanpa menolak arus globalisasi. Untuk diperhatikan,

dalam TEC, isme ekonomi dan pergerakan negara lain dalam investasi atau pergerakan tenaga kerja asing di sebuah negara diperbolehkan namun seyogyanya dibatasi dan diadakan tindakan yang bijaksana tanpa menyinggung negara lainnya. Kebijakan ini bisa tertuang dalam sebuah perjanjian yang saling menguntungkan antar negara dan tidak melukai negara dan masyarakatnya yang sama- sama sedang berjuang dalam arus globalisasi ekonomi yang sangat ketat persaingannya,

Untuk menguatkan TEC, setiap desa diberi kesempatan kompetisi yang sangat kuat, diberikan infrastruktur bagi pelaksanaan sistem TEC sehingga mampu menjadikan sebuah negara yang berkembang menjadi negara yang pesat secara ekonomi dan kekuatan SDM. Bagi negara yang sudah maju secara ekonomi, TEC dapat lebih menguatkan negara dari sisi ekonomi dan SDM agar tidak kalah persaingan dengan negara maju lainnya. Dengan hadirnya sistem TEC kecepatan penanggulangan tingkat korupsi secara *online* dapat diwujudkan tanpa berbelit birokrasi dan sistem hukum yang terkadang memakan waktu yang lama dan kurang adil dalam penyelesaiannya.

TEC akan membakar semangat warga negara dan aparat pemerintah untuk melakukan produktivitas kerja di bidang masing masing. Hal ini dikarenakan TEC mengenal istilah pemberian *reward* dan *punishment* secara *online* terbuka, transparan dan dapat dilihat dan disaksikan oleh warga desa lainnya di seluruh wilayah negara setiap saat.

Dengan adanya TEC, dimungkinkan kompetisi antar desa dan dipantau secara profesional oleh tingkatan di atasnya (kecamatan, kabupaten/kota dan seterusnya hingga pusat) dan *online* 24 (dua puluh empat) jam untuk dapat melihat perkembangan sebuah wilayah. Perkembangan ini dalam *software* yang dibangun dalam TEC dapat

berupa struktur garis dan grafik yang dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan keberhasilan 5 (lima) pilar TEC. Misalnya grafik produktivitas indikator pertama yaitu indikator SDM, pengamalan agama/kepercayaan serta cinta tanah air dari sebuah desa berwarna merah, artinya daerah tersebut masih harus ditingkatkan produktivitas masyarakatnya. Warna, kuning adalah daerah yang sudah mulai maju, hijau daerah yang maju dan putih daerah yang sangat maju/surplus (dalam arti ekonomi, pendidikan, pertahanan dan semuanya, sesuai dengan 5 (lima) pilar TEC).

Beberapa sistem dan mekanisme serta kelebihan dan kekurangan TEC akan dipaparkan dalam bab-bab selanjutnya. Dengan demikian akan semakin gamblang bagaimana TEC ini dapat memberikan kontribusi bagi sebuah negara yang menginginkan percepatan ekonomi di semua sektor terutama SDM dan kualitas negara dalam mengelola wilayah. Dengan konsep ini diharapkan mampu membendung kebangkrutan sebuah negara dan mampu memberikan percepatan di semua lini, seiring dengan kecepatan pergerakan masyarakat dan aparat pemerintah.

1.4. Proyeksi TEC

TEC diproyeksikan untuk membangun infrastruktur sistem ekonomi secara terpadu (lima pilar TEC) di sebuah negara yang memiliki struktur kelembagaan piramida terbalik di seluruh wilayah terkecil (desa) yang terkoneksi dengan *online report* secara *visual report* maupun dokumen *online*. Arti dari struktur kelembagaan piramida terbalik adalah bahwa orang nomor satu di sebuah negara (presiden, perdana menteri, raja ratu, kanselir dan istilah bagi pemimpin sebuah negara) harus memberikan

layanan terbaik untuk rakyatnya. Tidak harus turun langsung ke lapangan, namun dapat melihat perkembangan grafik pergerakan TEC setiap saat. Bila memungkinkan tetap turun lapangan dan menyemangati langsung rakyatnya. Dalam sistem TEC justru pemimpin adalah yang melayani masyarakatnya bukan yang dilayani. Seorang kepala desa adalah orang yang utama dalam mengawasi perkembangan 5 (lima) pilar TEC setiap saat dan mau berkorban untuk rakyatnya.

Sistem TEC menggunakan jaringan *high advanced technology* yang dikelola secara resmi oleh negara di tiap desa, dengan satu komando terpusat di ibu kota negara sebagai puncak dari laporan *online* secara berkala (tiap bulan sekali). Adapun laporan yang dikelola secara profesional oleh setiap “Kepala pemerintahan di tingkat desa” dan diteruskan kepada pemerintahan di atasnya dalam bentuk laporan visual maupun dokumen resmi yang terdiri 5 (lima) pilar TEC yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB II

SERVER DAN SISTEM *ONLINE* DI TIAP TINGKATAN PEMERINTAH

2.1. Definisi Server TEC dalam Pemerintahan Sistem *Online Report*

Server TEC dalam struktur pemerintahan sistem *online* adalah sebuah server yang disediakan negara di setiap titik struktur pemerintahan mulai dari pusat hingga desa. Mekanisme tata kerja yang saling menguatkan antara satu titik jaringan pelaporan di struktur pemerintahan tingkat desa dengan titik lain di desa lainnya di seluruh wilayah negara. Untuk itu diperlukan infrastruktur yang kuat dan memiliki *high technology* dengan sistem pendukung dari satelit dan *internet* yang kuat dan sedikit *trouble*. Dengan harapan sistem pendukung *online* ini akan mempercepat arus informasi dan pelaporan.

Memang sebuah negara harus banyak memberikan dana dan menginvestasikan struktur jaringan *online* ini untuk sebuah kepentingan yang lebih maju dan sistematis. Dengan adanya sistem pelaporan yang terstruktur dan rapi ini akan mencapai sasaran pembangunan ekonomi dan percepatan kemampuan sebuah negara untuk mendapatkan *economic gain*.

Penopang dari infrastruktur *online* ini tersambung di setiap desa dan langsung di bawah naungan Undang-Undang Negara, Dengan adanya naungan hukum ini, negara leluasa untuk merealisasikan proses pelaporan dan perkembangan produktivitas serta pemantauan seluruh aktivitas di desa seluruh wilayah negara. Pihak presiden atau kepala pemerintahan tinggal melaksanakan Undang-Undang yang telah

disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Senat serta lembaga konstitusi tertinggi di sebuah negara.

2.2. Sistem Server Information Technology (IT) yang Dibutuhkan

Server *Information Technology* (IT) yang harus dibangun oleh sebuah negara yang mengaplikasikan TEC di berbagai titik struktur pemerintahan antara lain:

1. Sistem server terpusat di ibu kota negara.

Server pusat dikendalikan langsung oleh kepala negara, dan asisten khusus yang membawahi untuk arus laporan informasi 24 (dua puluh empat) jam yang berasal dari seluruh titik di desa, sekaligus memantau propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Petugas sistem IT akan melaporkan kepada presiden atau kepala pemerintahan tentang perkembangan ekonomi, keamanan, budaya dan seluruhnya untuk kepentingan kemajuan negara. Dari hasil laporan tersebut secara langsung dapat dijawab dan dijadikan solusinya secara *online*, tanpa harus memakan waktu lama untuk administrasi dan birokrasi pemerintahan yang berbelit. Daya jangkauan langsung bisa mencapai semua titik di pelosok yang paling pelosok sekalipun di negara tersebut.

2. Sistem server teralokasi di propinsi

Sistem IT (server propinsi) yang dibangun ini bertempat di kantor gubernur, dengan sistem 24 (dua puluh empat) jam pengawasan struktur pemerintahan di bawahnya. Tugasnya antara lain merekap perkembangan kabupaten/kota. Disamping itu seorang gubernur dapat memberikan masukan atau saran kepada pemerintah kota, kabupaten bahkan hingga pelosok desa. Tentu saja seorang gubernur dapat

memberikan masukan kepada pemimpin negara di pusat pemerintahan untuk perkembangan yang lebih baik dan signifikan dalam percepatan ekonomi dan peningkatan sumberdaya manusia.

3. Sistem server teralokasi di kabupaten/kota

Sistem server kabupaten/kota ini dibangun di setiap kantor bupati atau kantor walikota yang mengelola segala informasi laporan dari kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut. Sistem ini merupakan transmisi data yang diarahkan atau diteruskan ke sistem IT di kantor gubernur dan pemerintah pusat. Gerak dan tindakan koordinasi di setiap kecamatan terpantau dengan sistematis oleh Bupati atau Walikota sehingga dapat menekan angka korupsi, terorisme, pengangguran, kriminalitas, dan hal-hal lain yang bermuatan negatif. Muatan negatif tersebut merupakan akumulasi dari kondisi nyata di wilayah kabupaten/kota yang dilakukan oleh aktor aparat pemerintah dan masyarakat umum.

Antisipasi dari kondisi buruk muatan negatif dapat langsung ditanggulangi secara *online* pada detik yang bersamaan misalnya, terjadi kriminalitas, pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, bahkan korupsi bisa langsung diberantas dengan sistem komando. Artinya, bupati/walikota bersama aparat penegak hukum langsung *action* di lokasi yang dilaporkan secara *online* oleh pihak kecamatan dibantu oleh pihak desa sebagai kesatuan terkecil.

Demikian pula pengangguran maupun lesunya kondisi ekonomi dapat langsung dideteksi dari mana asal penyebab terjadinya kondisi tersebut sehingga, pemerintah wilayah kabupaten/kota yang wilayahnya sedang mengalami keterpurukan ekonomi dapat dibantu secara langsung atau tidak langsung dalam tempo yang sesingkat-singkatnya oleh pihak

pemerintah kabupaten/kota atau pihak lainnya yang mengalami surplus ekonomi dan kuat sistem pembangunan ekonominya. Bantuan tersebut juga dapat berupa dana, kesempatan peluang kerja yang dibuka oleh kota/kabupaten yang surplus. Bantuan lainnya dapat berupa *advice* (saran) berupa bagaimana mengatasi kondisi mikro dan makro yang ada di wilayah yang sedang terpuruk. Misalnya, penguatan pasar tradisional, kerja sama antar kabupaten/kota, antar negara, investasi dan lain sebagainya.

Bantuan dari wilayah yang surplus tidak berarti mengurangi tingkat pendapatan warga masyarakat dan pemerintahan kabupaten/kota yang surplus tadi. Namun justru apabila mambantu yang sedang terpuruk maka ada kemungkinan nilai tambah didapat dari wilayah yang sedang terpuruk tersebut. Misalnya, wilayah surplus memerlukan bahan baku yang ada di wilayah terpuruk. Logikanya adalah proses produksi di wilayah surplus akan sangat terbantu dengan adanya kesiapan bahan baku yang di *supply* dari wilayah terpuruk. Dengan demikian akan memangkas ongkos transportasi dan biaya lainnya.

Simbiosis mutualisme dan bukan persaingan yang tidak sehat akan membuat negara semakin makmur karena didukung oleh wilayah kabupaten/kota yang kuat ekonominya dan tentu saja dibantu oleh kecamatan dan desa dalam ruang lingkup wilayah mereka. Seorang bupati/walikota tidak perlu memantau satu-persatu wilayah dan menghindari rapat yang tidak *efektif* dan *efesien* (pengeluaran biaya rapat terlalu besar atau pengeluaran lainnya yang tidak perlu dikeluarkan). Dengan TEC di server kantor bupati/walikota dapat dilihat secara gamblang pada layar sistem *online* semua perkembangan di wilayahnya. Jadi, sistem *online* ini dapat dikatakan sebagai *productivity detector* yang

mampu menganalisis secara akurat kondisi semua unit kerja yang ada di wilayah kabupaten/kota.

Uniknya dalam sistem TEC ini, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, di kabupaten/kota tersebut dapat mengakses laporan online dengan login sesuai dengan nomor KTP tersebut. Server di kabupaten/kota dapat mendeteksi KTP yang ada di wilayahnya, dan juga dapat mendeteksi KTP dan laporan *online* di seluruh wilayah negara.

4. Sistem server teralokasi di Kecamatan

Sistem server yang teralokasi di kecamatan adalah sistem server *online* TEC yang disediakan di kantor camat. Dengan adanya pos *online* di kantor camat dapat mengawasi dan mengendalikan wilayah-wilayah desa yang ada di kecamatan tersebut. Seorang camat dapat dibantu oleh tim yang selalu mengawasi online perkembangan indikator TEC.

Bagi camat yang memiliki kredibilitas tinggi dan loyalitas yang tinggi, siap berjuang untuk masyarakatnya, maka *reward* akan diberikan kepada camat yang memiliki kemampuan cepat dan profesional dalam pelaksanaan TEC. Masyarakat juga dapat melaporkan *online* di CCTV yang ada di kantor kecamatan. Misalnya ada upaya makar atau kejahatan di wilayah Kecamatan atau kejadian kriminalitas. Namun bila seorang masyarakat tidak dapat langsung ke posko *online* kecamatan, masyarakat dapat menggunakan HP (*handphone*) untuk melaporkan SMS dan mungkin foto yang dapat dikirim ke posko *online* di kecamatan, sehingga dapat diteruskan ke aparat keamanan maupun unsur lain yang dapat membantu masyarakat secara cepat. Masyarakat yang memberi laporan dengan cepat itu akan mendapatkan *reward* yang pantas dari negara dan *reward* dari masyarakat lain yang melihat hal tersebut dengan doa,

ucapan selamat, sertifikat dan material sesuai dengan kondisi pemberi *reward* (tidak harus material)

Unsur tokoh agama dan budaya serta anak-anak yatim piatu atau anak-anak fakir miskin dapat ikut mengawal camat dalam melaksanakan tugasnya, dengan cara berdoa setiap saat dan camat akan dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa tendensi untuk rakus dalam kekuasaan maupun pengharapan imbalan keuangan. Dengan demikian pelaksanaan *online* di pemerintahan tingkat kecamatan akan lebih signifikan dan terus diadakan perbaikan secara simultan.

5. Sistem server teralokasi di Desa

Sistem server di kantor kepala desa menyediakan pantauan kinerja masyarakat yang ada di desa tersebut. Kepala desa memantau dan memberikan reaksi yang cepat untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desanya.

Dalam TEC, sebuah kebebasan dalam berkarya bagi seorang kepala desa dan dibantu oleh staf-stafnya dan juga aparatur negara yang ditunjuk ditingkat RT/RW dalam desa tersebut dipersilahkan. Sistem ini menguatkan percepatan ekonomi dan 5 (lima) pilar TEC di sebuah desa sebagai titik terkecil pemerintahan di sebuah negara namun paling menentukan keberhasilan secara makro negara. Artinya desa yang terintegrasi dalam TEC dari desa yang ada di kota hingga desa yang ada di pelosok pedalaman terkoneksi secara *online*. Dan semua pergerakan SDM, cinta tanah air, ekonomi pendidikan, budaya, pertahanan keamanan, kesehatan dan pengelolaan SDA serta sistem *reward* dan *punishment* dapat terpantau dengan cepat.

Desa adalah miniatur sebuah negara sehingga TEC mempunyai prinsip bahwa “nasib” negara ada di tangan desa dan kepala desa beserta

jajaran staf dan masyarakatnya. Bagi desa yang tidak melaksanakan sistem TEC dianggap melawan negara sesuai dengan Undang-Undang Negara, dan hal ini diberi *punishment* sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di negara tersebut.

23. Sistem Hukum yang Dibutuhkan

Sistem hukum yang diperlukan dalam TEC adalah sistem hukum yang otoriter yang diberlakukan dari pusat sampai daerah dan berlaku bagi setiap warga negara tanpa memandang aparat pemerintah atau masyarakat biasa. Sistem hukum ini penopang operasional yang detail dan bersifat otoriter dalam melaksanakan setiap kegiatan dari TEC. Artinya harus jelas adanya *reward* dan *punishment* yang harus diaplikasikan secara tegas, transparan dan langsung berdampak pada setiap warga negara atau aparatur negara yang melakukan produktivitas kerjanya di bidang mereka masing-masing.

Sistem hukum TEC tidak mengenal seseorang kebal hukum namun aplikasi hukumnya mampu mempercepat penangkalan hukum, pemberantasan korupsi, menekan angka kriminalitas dan bahkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan gairah mencintai tanah air serta peduli terhadap sesama warga yang berada didalam maupun luar negeri. Mereka yang benar-benar melakukan produktivitas secara maksimal akan mendapatkan *reward* yang maksimal juga baik dari negara maupun masyarakat sekitar. Namun bagi mereka yang melanggar norma hukum negara dan tidak melakukan produktivitas sesuai dengan porsi mereka akan mendapatkan *punishment* dari negara.

Secara *online* televisi yang resmi ditujuk oleh negara menyiarkan langsung produktivitas semua titik warga negara dan aparatur

pemerintah yang ada di pelosok desa negara tersebut sehingga masyarakat setiap RT/RW dan desa bisa melihat perkembangan kondisi 5 (lima) pilar TEC secara transparan dan akan membangkitkan jiwa kompetisi yang positif antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan antar propinsi.

Bagi masyarakat atas kelompok golongan yang berjuang secara maksimal untuk membantu penderitaan masyarakat lainnya akan menjadi hal yang biasa dalam TEC. Adalah sebuah kewajiban bagi setiap warga negara untuk menolong orang lain mulai dari keluarga terdekatnya dalam satu rumah sampai ke tetangga-tetangga yang dekat dari rumahnya hingga tetangga-tetangga yang jauh dari rumahnya dan sifat bantuan kepada orang lain tidak harus berupa uang atau ekonomi namun bisa berupa tenaga, pikiran, motivasi dan *transfer of knowledge*. Bahkan doa juga dapat dicatat sebagai poin penting sebagai produktivitas kerja dan bukti kesungguhan seorang warga negara untuk membangun dan mempercepat ekonomi dan membangun negaranya.

Sistem hukum yang diproduksi oleh lembaga-lembaga pemerintahan harus terintegrasi dalam satu sistem TEC misalnya undang-undang anti korupsi, undang-undang anti terorisme, undang-undang pendidikan, undang-undang perekonomian dan semua produk hukum negara. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan sistem satu komando yang menjadi modal utama dalam kehidupan masyarakat.

Sebenarnya bila memungkinkan, negara dapat menyediakan server atau posko pelaporan *online* di setiap RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga), sehingga memudahkan desa untuk memantau perkembangan lima indikator keberhasilan dalam TEC tersebut.

BAB III

MEKANISME PEMERINTAH

3.1. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan arus informasi dan memantau serta melakukan tindakan eksekusi perbaikan secara terus menerus berbasiskan lima pilar TEC baik di bidang ekonomi, pendidikan, keamanan, administrasi, budaya, dan agama serta bidang lainnya yang dianggap penting. Pemerintah pusat dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan sebagai pengambil kebijakan dan peraturan di setiap negara.

Sistem komando terpusat bukanlah terletak pada pribadi seorang pemimpin negara namun terletak pada sistem *online* dengan segala peraturan yang telah disahkan oleh Majelis Konstitusi tertinggi baik Senat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Musyawarah Perwakilan Rakyat (MPR), atau Lembaga Konstitusi Hukum tertinggi lainnya misalnya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Ini berarti undang-undang yang memayungi peraturan dan hukum sistem *online* adalah kemutlakan yang menjadi dasar utama dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang negara tersebut telah menyepakati sistem tersebut. Dengan payung hukum tersebut kepala pemerintahan sebuah negara dapat dengan leluasa menentukan arah kebijakan yang tegas transparan, dan dapat dipantau atau dilihat secara *online* oleh seluruh lapisan masyarakat maupun penegak hukum serta alat negara dengan sistem komando.

Dengan demikian sistem ini sangat membantu mekanisme keputusan tanpa harus membuang waktu dan anggaran serta perdebatan politik yang berakibat menghambat pengambilan keputusan presiden tersebut. Unsur pengawas pemerintah misalnya, DPR dan MPR serta non-governmental organization (NGO) dapat berkontribusi secara cepat dalam memberikan masukan yang efektif dan efisien untuk melangsungkan dan menyukseskan percepatan infrastruktur ekonomi, kondusif dimasyarakat baik secara politik maupun anti terorisme serta percepatan lainnya di segala bidang termasuk penguatan SDM negara tersebut. Kendali tertinggi tetap di tangan kepala pemerintahan. Namun apabila keputusan kepala negara tersebut tidak sesuai dengan sistem *online* TEC maka unsur Senat, DPR, MPR dan unsur penegak hukum lainnya dapat memberikan arahan atau masukan yang bijaksana kepada kepala negara tersebut.

Sistem pemilihan kepala negara tergantung kepada kondisi setiap negara. Misalnya, seorang kepala negara dapat dipilih selama lima tahun sekali dan diganti atau dipilih kembali oleh masyarakat negara tersebut tanpa melanggar undang-undang sistem pemerintahan. Kontribusi partai politik memang sangat penting untuk mencalonkan kepala negara. Namun demikian, pada saat sudah terpilih, seorang kepala negara, partai politik diharapkan tidak mencampuri terlalu dalam keputusan kepala negara yang telah menjadi milik masyarakat secara luas.

Sistem TEC tidak akan berubah sepanjang undang-undang yang memayungi sistem ini tetap diberlakukan. Yang dapat berubah adalah orang atau penyelenggara negara atau aparat pemerintah yang dapat berganti setiap periode. Sehingga setiap periode pergerakan ekonomi dan unsur lainnya akan bertambah lebih baik seiring dengan perbaikan

terus- menerus kondisi ekonomi dengan melihat grafik laporan dari sistem *online* yang berlaku 24 (dua puluh empat) jam setiap hari dengan terus-menerus diadakan perbaikan secara cepat. Target pencapaiannya ekonomi yang telah dilakukan oleh seorang kepala negara dapat dilanjutkan oleh kepala negara lainnya berdasarkan laporan secara transparan dari sistem TEC yang di *support* oleh arus informasi yang berasal dari seluruh wilayah negara tersebut.

Kementerian-kementerian dan lembaga tinggi lainnya di bawah kepala negara juga memiliki pusat laporan TEC yang berasal dari laporan kantor-kantor di bawah naungan kementerian-kementerian maupun lembaga tinggi lainnya yang tersebar di wilayah negara tersebut. Lebih lanjut, seluruh kordinasi harus diserahkan kepada *server* pusat yaitu kepala negara. Artinya seorang menteri boleh mengambil kebijakan masing- masing yang akan membantu kepala negara mempercepat pengambilan keputusan di bidang wilayah kerjanya tanpa harus menunggu keputusan kepala negara. Terkecuali, apabila ada hal yang *urgent* dan membahayakan negara harus berkonsultasi kepada kepala negara. Sebagai contoh, di suatu wilayah ada investor asing yang akan menanamkan modalnya dengan mendirikan pabrik. Sayangnya, investor asing berusaha menyuap dan memaksa aparat pemerintah dan staf kementerian. Dengan melihat kondisi ini, maka seorang menteri harus memberikan surat peringatan dan pemberitahuan untuk menolak investor asing tersebut. Apabila seorang Menteri mengalami kesulitan yang menyangkut masalah hubungan investasi antar negara maka menteri tersebut dapat melaporkan secara *online* dan dapat bertemu langsung dengan kepala negara.

Sebagai catatan, sepanjang arus informasi di kementerian dan lembaga negara lainnya dalam mekanisme penegakan hukum serta pengambilan tindakan tidak membahayakan negara (sudah menjadi standar operasional pekerjaan seorang menteri) maka menteri dapat mengambil keputusan secara cepat.

32. Pemerintah Propinsi

Pengendali tertinggi di wilayah propinsi dipegang oleh seorang gubernur. Sistem TEC tidak memaksa bentuk atau tatacara pemilihan seorang gubernur. Hal ini diserahkan kepada kondisi politik negara masing-masing. Namun demikian seorang gubernur wajib melaksanakan sistem TEC yang dilaporkan kepada pemerintah pusat secara periodik minimal seminggu sekali namun tetap *online* setiap 24 (dua puluh empat) jam sehari. CCTV juga dipasang di posko gubernur yang terhubung di seluruh wilayah gubernur. Arus informasi secara transparan dan pengambilan keputusan seorang gubernur dapat dilihat secara *online* oleh seluruh masyarakat di propinsi tersebut dan bahkan kepala pemerintah di tingkat kabupaten/kota serta kecamatan dan desa. Dengan adanya hal tersebut, maka semua unsur masyarakat dan kepala pemerintahan di tingkat di bawah propinsi dapat melihat tindak-tanduk serta kebijakan yang dilakukan oleh gubernur mereka.

CCTV gubernur juga dapat dilihat secara transparan oleh masyarakatnya mulai dari aktivitas pagi hingga malam. Apakah benar-benar gubernur tersebut menangis untuk rakyatnya, apakah gubernur tersebut sholat malam untuk rakyatnya? Apakah gubernur mereka puasa dan selalu berdoa dan menangis untuk rakyatnya? Hal ini sangat terlihat di CCTV dan televisi online resmi pemerintah. TEC tidak

memperdulikan apakah tindakan gubernur hanya *action* atau pura-pura untuk mendapatkan pamrih, namun TEC tetap memberlakukan *reward* dan *punishment* seorang gubernur sesuai dengan kinerjanya.

Sebagai konsekuensinya, bagi gubernur yang luar biasa berkerja kerasnya, arif tindakannya, dan megayomi rakyatnya akan diberi *reward* yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah pusat baik penghargaan yang bersifat finansial maupun non finansial. Namun sebaliknya apabila seorang gubernur melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Negara, tidak bijaksana dalam memimpin propinsi, tentu saja mendapat *punishment* yang dilakukan oleh kepala negara, aparat penegak hukum, dan bahkan masyarakat di wilayah propinsi tersebut. Dengan demikian seorang gubernur bisa saja diganti atau dicopot jabatannya sebelum masa jabatannya selesai.

Peran masyarakat baik masyarakat sipil, ulama, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat lainnya dapat membantu seorang gubernur dalam hal memberikan masukan dan saran melalui *online advice* atau bersilaturahmi secara langsung dengan gubernur tersebut. Apabila seorang gubernur mendapatkan kepelikan masalah maka masyarakat bisa memberi kontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui saran yang membangun bukan saran yang menjatuhkan

3.3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengendali pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dipegang oleh seorang bupati atau walikota. Dengan struktur pemerintahan di tangan bupati atau walikota akan mengendalikan seluruh laporan informasi yang berasal dari kecamatan-kecamatan dan desa di lingkungan di mana kabupaten/kota tersebut berada.

Seorang bupati atau walikota akan menjadi eksekutor tertinggi di wilayah kabupaten/kota. Dengan segala informasi dan laporan yang berlaku 24 (dua puluh empat) jam setiap hari dan dengan pemantauan secara *online* dan dibantu oleh dinas- dinas yang ada di bawahnya, maka pergerakan pengambilan keputusan dan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat akan lebih cepat dan berbasiskan data yang akurat.

34. Pemerintah Kecamatan

Pengendali pemerintahan di tingkat kecamatan adalah seorang camat, dan camat memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan struktur pemerintahan di wilayah kecamatan tersebut. Seorang camat dapat menghentikan kepala desa yang tidak sesuai dengan standar operasional TEC. Di samping itu, seorang camat juga menjadi mitra bagi bupati, gubernur dan pemimpin negara untuk penghubung antara desa dengan struktur pemerintahan di atasnya.

Seorang camat yang baik akan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekitar kecamatan dengan jalan bekerja keras, keliling kecamatan dan selalu memantau perkembangan keberhasilan 5 (lima) pilar TEC. Camat dapat juga dicopot dari jabatannya apabila melanggar undang-undang yang berlaku dan bisa juga masyarakat menilai seorang camat tidak mampu melaksanakan program TEC.

Reward akan diberikan kepada camat yang memiliki produktivitas tingkat tinggi dan selalu siap “capek” dan tidak mementingkan diri sendiri. *Reward* dapat berupa sejumlah nilai uang dan mungkin bisa berupa sertifikat atau apresiasi dari camat dan masyarakat lainnya secara luas.

3.5. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK) langsung dari pemerintah pusat melalui pemerintah kecamatan. Pengusulan kepala desa bisa dari partai politik yang memenangkan pemilihan desa atau usulan dari masyarakat secara luas. Seorang kepala desa akan dibantu oleh minimal tim ahli bidang SDM, ekonomi, keamanan, dan pendidikan.

Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi perkembangan 5 (lima) pilar TEC di desanya dan selalu melaporkan secara *online* setiap harinya kepada posko di kecamatan. Dengan adanya pola kegiatan yang aktif dan reaktif yang baik, akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi di tingkat desa.

Kepala desa juga dapat mengganti ketua RT (Rukun Tetangga) atau ketua RW (Rukun Warga) sebelum masa jabatan mereka berakhir, apabila terbukti melakukan pelanggaran dan tidak mampu memberikan sumbangsih produktivitas kerja bagi negara melalui kontribusi penegakan indikator TEC di wilayah desanya.

Seorang kepala desa juga bisa berkeliling dari satu RT (Rukun Tetangga) ke RT (Rukun Warga) lainnya untuk mengobarkan semangat yang besar untuk pengorbanan kepada tanah air dan selalu berupaya meminimalkan tindakan kriminalitas misalnya korupsi, kebohongan publik dan pelaporan masyarakat yang palsu.

BAB IV

SISTEM OTORITER KERAKYATAN DALAM TEC

4.1. Menetapkan Sistem Pemerintahan Otoriter Kerakyatan

Di dalam sistem ini memang harus dikendalikan secara otoriter dan dikelola oleh SDM aparatur pemerintah yang ditunjuk mulai dari RT/RW hingga pemerintah pusat yang *trusted* (terpercaya). Artinya sistem ini merupakan kemauan serentak warga negara yang ingin bangkit secara ekonomi dan berkualitas secara SDM baik dari indikator pendidikan, budaya dan norma masyarakat internasional. Otoritas seorang kepala negara sangat tinggi dan tidak bisa dicegah selama untuk kepentingan negara. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senat, MPR, tokoh agama, tokoh adat dapat memberikan masukan kepada pemimpin negara secara *online*. Untuk pergantian pemimpin negara minimal lima tahun atau menyesuaikan Undang-Undang Negara tersebut. Pemimpin negara dapat diganti apabila melakukan pelanggaran berat konstitusi negara.

Apabila pimpinan negara mengalami kekurangan seyogyanya tidak dicopot hingga masa jabatannya berakhir. Apabila dicopot sebelum masa jabatannya akan berdampak pada kestabilan pelaksanaan sistem dan memerlukan anggaran untuk pemilu yang cukup besar. Namun untuk jabatan menteri, gubernur hingga kepala desa dan ketua RT dapat diganti apabila melakukan pelanggaran sistem yang cukup berat, misalnya, korupsi atau hal-hal lain yang merugikan masyarakat secara luas.

Otoritas tertinggi memang ada di tangan rakyat. Konsekuensinya rakyat berbasis TEC dapat memberikan kewenangan kepada petugas

negara atau pimpinan-pimpinan serta aparatur yang ditunjuk negara melalui undang-undang yang sah di negara tersebut.

4.2. Keunikan Pengawalan Sistem TEC

Keunikan sistem TEC mungkin belum ada di manapun secara keilmuan ekonomi dan tatanegara adalah bahwa masing- masing jabatan puncak baik di level pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa serta RT/RW dikelilingi oleh enam unsur utama yaitu:

1. Tokoh agama beserta anak yatim piatu untuk menjaga dan mengingatkan pemimpin di masing- masing pemerintahan demi menjaga tujuan percepatan kemakmuran negara dan masyarakat
2. Tokoh militer dan keamanan yang selalu siap menegakkan keamanan dan hukum serta menjaga pemimpin agar tetap wibawa baik di mata masyarakat negara itu sendiri maupun mata masyarakat luar negeri.
3. Tokoh pendidikan dan penelitian yaitu orang-orang yang terdidik dan ahli riset untuk selalu menuangkan inovasi- inovasi baru dalam pengembangan ekonomi dan semua aspek di wilayah pemerintahan.
4. Tokoh adat dan budaya yang selalu mengingatkan norma-norma budaya dan adat dan menjadi simbol jatidiri negara.
5. Tokoh ekonomi dan teknologi yang selalu mensupport perkembangan ekonomi dan teknologi wilayah tersebut
6. Orang-orang miskin dan fakir serta yang dianggap ahli ibadah untuk mendoakan pemimpin di wilayahnya masing-masing.

Dari uraian di atas keenam tokoh tersebut di atas, personal yang ditunjuk harus diangkat melalui Surat Keputusan (SK) pemerintah dan diberi gaji untuk mendampingi pemimpin wilayah di manapun berada

terutama menjaga server pos di wilayah masing- masing. Misalnya di kantor gubernur, kantor bupati, kantor camat, kantor desa dan RT/RW.

Tugas para tokoh agama, fakir miskin, anak-anak yatim piatu adalah mendampingi dan mengawal pelaksanaan TEC dengan selalu berdoa pagi, siang dan malam dan memohon kepada Tuhan agar selalu diberi kekuatan dalam menjalankan tugas para pemimpin pada struktur masyarakat tersebut. Mereka selalu membaca kitab suci menurut agama dan kepercayaan mereka masing- masing dan menebarkan nuansa yang damai, nyaman dan selalu dekat dengan Tuhan.

BAB V

MEKANISME PEREKRUTAN APARATUR PEMERINTAH DAN PILIHAN POLITIK SUATU NEGARA

5.1. Mengangkat Personal di Struktur Pemerintahan di Wilayah Terkecil

Untuk mengangkat personal berdasarkan TEC harus diangkat melalui Surat Keputusan (SK) resmi negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi gaji secara resmi dengan jumlah yang cukup besar untuk melayani masyarakat di wilayah pos masing-masing.

Personal utama adalah pemimpin wilayah dan dibantu oleh enam tokoh yang diangkat sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya dengan honor yang besar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mereka mendapatkan *reward* apabila mencapai target perolehan produktivitas di atas rata-rata yang ditetapkan oleh negara sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Pengangkatan personal bisa diusulkan oleh masyarakat dan bisa juga diangkat langsung oleh pemerintah pusat melalui seleksi yang sangat ketat. Namun demikian masyarakat boleh mengusulkan tokoh-tokoh kunci dalam struktur pemerintahan mulai dari RT hingga pemerintah gubernur khusus untuk pemerintah pusat harus dilakukan pemilu nasional.

Partai politik dalam TEC disarankan agar tidak terlalu banyak misalnya, tiga kelompok partai besar dan di dalamnya boleh terdiri partai-partai kecil yang bergabung untuk memilih pemimpin negara, gubernur, hingga kepala desa yang dilakukan secara periodik sesuai

dengan undang-undang masing-masing. Namun untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan disarankan pemilu serentak lima tahun sekali untuk memilih kepala negara, gubernur, bupati/walikota hingga kepala desa untuk jangka waktu lima tahun. Apabila sudah terpilih para pejabat tersebut sudah bukan bagian kepentingan partai politik lagi tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kosekuensinya adalah apabila para pemimpin melanggar sistem maka akan diganti secara langsung dan ditunjuk oleh pemimpin negara melalui SK khusus.

Dalam TEC setiap calon yang diusung oleh parpol harus bersedia totalitas mendukung negara dan tidak dipungut biaya untuk pemilu karena mereka yang duduk di struktur pemerintahan adalah mereka yang siap miskin bukan siap kaya, siap bekerja keras bukan malas, serta siap dipantau 24 (dua puluh empat) jam secara *online* oleh *server* TEC untuk membangun bangsa yang besar secara ekonomi berbais SDM yang mulia.

Politik adalah alat yang digunakan hanya untuk kepentingan rakyat mengantarkan wakil-wakil mereka namun tidak ada kepentingan secara finansial maupun kekuasaan. Justru parpol yang mengusung pemimpin yang hebat dan membuktikan kehebatannya dalam mengelola negara akan diberi *reward* oleh negara serta masyarakat baik berupa finansial maupun non finansial bagi parpol yang mangajukan orang-orang yang akan memiliki dampak menjadi koruptor dan tidak dapat menjalankan sistem dengan baik akan mendapat *punishment* dari negara dan masyarakat sehingga apabila parpol tersebut *track record* tidak baik selama dua pemilu berturut-turut akan ditutup oleh negara.

Dalam TEC disarankan tidak diisi oleh orang-orang yang homogen namun harus heterogen dan plural. Misalnya, pemerintahan di tingkat

propinsi A diisi oleh orang-orang nasionalis dan liberalis. Demikian pemimpin di pemerintahan tingkat propinsi B komposisi personalnya tidak boleh satu haluan atau kelompok. Hal ini untuk menghindari negara dikuasai oleh hanya kelompok tertentu yang cenderung korup dan nepotisme. Di samping itu untuk menghindari perpecahan konflik kepentingan antar kubu atau golongan masing-masing.

Sekali lagi politik hanya sebagai alat bukan kekuasaan tapi untuk penguatan dan kebangkitan ekonomi sebuah bangsa dan memakmurkan masyarakat secara merata (walaupun tidak sama rata-sama rasa). Memang tidak ada sistem yang sempurna dan dapat memuaskan semua orang. Namun setidaknya TEC hadir untuk menjadi terobosan strategi sebuah negara untuk mengatur kembali segala aspek yang berhubungan dengan kebangkitan negara di semua sektor.

Dalam TEC individu akan dihargai sesuai dengan produktivitas masing-masing dan berhak memiliki kekayaan dan bisnis namun dibatasi sesuai undang-undang negara tanpa monopoli dari segelintir orang. Namun negaralah yang harus menguasai seluruh kekayaan ekonomi dan pengaturan bisnis untuk kepentingan rakyat secara merata. Investor tetap boleh masuk ke negara berbasis TEC namun tetap dibatasi agar tidak menghancurkan ekonomi masyarakat negara tersebut atau yang dikenal pe njajahan ekonomi di era modern.

5.2. Pilihan Politik Negara

Negara yang menggunakan sistem TEC boleh berbasis komunisme, liberalisme, sosialisme, religiusme dan kapitalisme serta isme-isme politik lainnya.

Sistem TEC fleksibel digunakan di mana saja sepanjang untuk penguatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, anti terorisme, anti korupsi, secara cepat karena menggunakan kontrol sistem *online*. Namun idealnya dalam TEC orang-orang pemegang kekuasaan dalam struktur pemerintahan adalah orang-orang yang siap mati untuk negaranya, melayani masyarakatnya di siang dan malam hari tanpa pamrih keuangan atau mengejar kekayaan duniawi. Namun dalam TEC justru yang harus dikayakan pertama adalah masyarakatnya bukan dirinya atau keluarganya. Kontrak politik dalam TEC, seorang pemimpin negara dan semua jabatan di pemerintahan mulai dari desa hingga pusat harus siap mati, siap miskin, siap capek dan beribadah untuk Tuhan dan negaranya serta mengandalkan balasan di akhirat dan ketenangan batin selama di dunia.

BAB VI

MEKANISME SUBSIDI ANTAR DESA

6.1. Definisi Subsidi antar Desa

Subsidi ekonomi antar desa adalah sebuah proses transformasi ekonomi berupa bantuan ekonomi dari sebuah desa yang surplus kepada desa lain yang minus. Bentuk- bentuk bantuan ekonomi dapat berupa peluang pekerjaan yang disediakan oleh desa surplus kepada desa minus. Misalnya desa surplus memiliki pabrik pengolahan industri kopi. Pabrik tersebut membutuhkan beberapa karyawan yang tidak dapat dicover oleh desa surplus sehingga memerlukan beberapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan adanya peluang kerja tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di desa minus. Sehingga diharapkan tidak terjadi proses migrasi ke negara lain untuk menjadi tenaga migran baik sebagai pembantu rumah tangga maupun jenis pekerjaan kasar lainnya.

Transformasi ekonomi lainnya dapat berupa bantuan keuangan berupa pinjaman uang kepada penduduk desa minus yang akan membuka beberapa usaha ekonomi. Bentuk koperasi yang maju di desa surplus yang telah memberikan kemakmuran baik berupa tingginya pendapatan maupun operasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa surplus dapat dialirkan dananya kepada desa minus. Sistem pinjaman lunak tersebut bersifat fleksibel sehingga memudahkan penduduk desa minus untuk mengelola dengan baik pembukaan usaha baru baik berupa pengelolaan pertanian, peternakan, industri maupun pengelolaan jenis usaha UMKM lainnya.

Transformasi ekonomi dapat dilakukan apabila desa surplus telah memiliki cadangan keuangan dalam jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun ke depan. Sistem penghitungan keuangan dikatakan surplus, apabila sudah mampu membiayai warga desanya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ke depan dan tidak ada hutang secara signifikan kepada perbankan negara dan swasta. Sistem penghitungan dikatakan surplus dapat dilakukan oleh tim auditor pusat yang ahli dalam penghitungan ekonomi. Indikator tidak ada kelaparan dalam desa yang surplus, semua orang berpendidikan minimal strata dua, infrastruktur kesehatan, keamanan, keagamaan dan lain sebagainya sudah terpenuhi sesuai dengan standard TEC.

Upaya-upaya transformasi ekonomi dan bantuan ke wilayah lain ini untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi di masa yang akan datang. Lembaga perbankan pemerintah atau swasta dapat ikut membantu pengelolaan keuangan secara profesional sehingga akan diuntungkan semua pihak baik desa tersebut maupun lembaga perbankan yang ikut andil dalam pengelolaan keuangan.

6.2. Otonomi Ekonomi Surplus Desa

Sebuah desa yang surplus diberi kesempatan untuk mengelola ekonomi secara independen tanpa harus meminta bantuan kepada pihak kecamatan maupun struktur pemerintahan di atas. Dengan adanya otonomi tersebut setiap desa dapat berlomba-lomba untuk meningkatkan ekonomi di desanya dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan cara membantu desa-desa yang ada di negaranya menurut kemampuan masing-masing.

Pergerakan ekonomi di sebuah desa dapat diukur sebagai berikut:

1. Sistem koperasi yang kuat, profesional yang dapat membantu masyarakat desa untuk secara mandiri meningkatkan usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan lain sebagainya.
2. Tidak ada fakir miskin dan orang-orang yang terlantar serta tidak ada orang yang kekurangan makan setiap harinya.
3. Seluruh penduduk desa mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang pendidikan tinggi dan memiliki tabungan yang cukup untuk hari tuanya.
4. Setiap warga memiliki rumah yang layak huni bersih dan sehat serta tidak memiliki tanggungan hutang yang signifikan dalam proses pembuatan rumah tersebut.
5. Penduduk desa mampu melakukan perjalanan rekreasi keluar negeri serta melakukan ibadah haji bagi umat muslim dan bagi agama lain keluar negeri ketempat ibadah masing-masing.
6. Memiliki transaksi ekonomi bukan hanya antar daerah di negaranya tapi juga mampu mengeksport produk-produk yang dihasilkan di daerahnya.

6.3. Manajemen Transformasi Ekonomi Antar Desa

Manajemen ini berfungsi untuk mengatur perencanaan dari awal hingga evaluasi transformasi ekonomi di desa tersebut. Sistem pelaporan kepada struktur pemerintahan di atasnya melalui *online* setiap minggu sehingga pergerakan ekonomi dapat dipantau sampai tingkat pusat.

Pihak pemerintahan pusat, propinsi kabupaten/kota dan kecamatan dapat memberikan masukan kepada desa surplus untuk membantu desa-

desa lainnya yang minus. Sistem manajemen transformasi ini sangat diperlukan untuk upaya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah desa yang ada di kota maupun yang ada di pedalaman. Dengan adanya transformasi ini merupakan pemicu tumbuhnya semangat orang yang lemah, fakir miskin, orang yang terlibat hukum maupun masalah-masalah lainnya secara ekonomi maupun non ekonomi untuk lebih mencintai tanah airnya.

Pergerakan transformasi dalam hitungan detik yaitu perpindahan surplus ekonomi dari satu desa yang memiliki kelebihan ekonomi dan sumberdaya manusia kepada desa lain yang sedang menderita atau perlu bantuan. Hal ini akan menghadirkan swadaya ekonomi masyarakat adalah kekuatan ekonomi dengan jiwa gotong royong saling bahu membahu demi bangsa dan negaranya.

BAB VII

SISTEM PERTAHANAN DAN ANTI TERORISME

7.1. Definisi Sistem Pertahanan dan Anti Terorisme

Sistem pertahanan dan anti terorisme menurut TEC adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara kondisi riil keamanan di sebuah desa dalam konteks tidak adanya kekacauan, pencurian, dan minimalnya angka kriminalitas serta pengaruh atau serangan dari luar negeri atau pihak oknum dari desa lainnya atau didalam desa itu sendiri yang membuat instabilitas keamanan.

Kondisi keamanan tidak lepas dari anti terorisme yaitu sebuah tindakan dan gerakan cepat untuk menanggulangi terorisme di wilayah sebuah desa. Misalnya, pemantauan gerakan terorisme dan gerakan separatis me dari setiap RT/RW dan desa tersebut. Pemantauan itu melalui sistem *online* dengan cara koneksi antara CCTV di setiap RT/RW yang terhubung ke desa sehingga apabila ada gerakan yang mencurigakan dapat dilaporkan secara cepat dan dilakukan tindakan sesegera mungkin untuk meredam dan menghukum teroris dan gerakan separatis.

7.2. Mekanisme Sistem Pertahanan dan Anti Terorisme

Menurut TEC sistem pertahanan yang efektif adalah me mberdayakan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut untuk cinta tanah air dan membela negaranya dengan sistem tentara rakyat. Artinya setiap warga yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun baik laki- laki maupun perempuan dan belum lansia atau di bawah

umur 60 (enam puluh) tahun mempunyai kewajiban untuk membela tanah air dengan sistem pertahanan semesta. Artinya ajaran cinta tanah air menjadi kewajiban bagi warga negara yang memiliki KTP (kartu tanda penduduk) minimal 18 tahun untuk di didik menjadi tentara rakyat sesuai dengan kurikulum pertahanan rakyat. Misalnya, seorang warga negara di didik selama minimal 3 (tiga) bulan sebagai basis pengetahuan pertahanan rakyat dan selanjutnya tergantung masing- masing individu untuk melanjutkan jenjang karier di militer atau tidak.

Apabila ada warga yang menolak pendidikan dasar bela negara tersebut maka tidak diberi KTP atau kartu identitas lainnya untuk legalitas sebagai warga negara, dan dianggap melawan negara. Dengan demikian setiap warga negara wajib membela negaranya menurut kadar kemampuan masing- masing dan pemantauannya melalui CCTV *online* yang disediakan di setiap RT/RW.

Apabila ada gerakan yang mencurigakan maka setiap warga desa wajib dan berhak melaporkan melalui CCTV atau laporan *online* di balai desa tersebut. Komando di sebuah desa ditangani oleh perwira militer yang ditunjuk oleh pusat dan memiliki pasukan kecil di setiap RT/RW di desa tersebut. Demikian juga pihak kepolisian memiliki sebuah perwakilan di setiap desa dan memiliki pasukan kecil di setiap RT/RW. Apabila tidak terjadi terorisme atau separatis me artinya dalam kondisi aman maka petugas militer dan kepolisian dapat difungsikan untuk memutar roda ekonomi misalnya, membangun infrastruktur dan membantu para petani, nelayan atau buruh serta masyarakat lainnya untuk melakukan aktivitasnya sehari- hari.

Memang anggaran untuk keamanan cukup besar tetapi efek dari program ini akan memompa semangat produktivitas rakyat sebuah

negara. SDM yang cinta tanah air adalah kunci keberhasilan. TEC mensupport semangat membangun tanah air dan selalu digelorakan setiap saat dengan memaksimalkan produktivitas kerja masyarakat desa mulai dari yang berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa, petani, nelayan, pedagang, karyawan, dokter, hakim, buruh dan jenis pekerjaan lainnya.

7.3. Alur Laporan Online

Setiap petugas keamanan dan kepolisian yang diangkat oleh negara, wajib melaporkan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat setiap hari kepada struktur keamanan dan kepolisian di atasnya yaitu kecamatan dan kabupaten serta propinsi. Kepala desa yang dipilih atau ditunjuk oleh negara juga ikut bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban dengan cara memantau perkembangan desa. Data keamanan diinput petugas keamanan dan kepolisian sehingga memudahkan melakukan penanganan dengan cepat apabila terjadi ketidak amanan di suatu wilayah tersebut.

Apabila di sebuah desa ada gerakan terorisme dan separatisme atau tindakan kriminalitas maka dengan cepat ditangani oleh warga desa itu atau desa lain yang mengetahui desa tersebut sedang bermasalah keamanannya. Hal ini untuk segera dilakukan penanganan misalnya penangkapan atau tindakan pencegahan sebelum melebar dan berdampak ke desa-desa lainnya.

Apabila terjadi sebuah perang atau gerakan separatis maka dengan cepat tentara rakyat yang telah di didik dapat melakukan tindakan dan menekan bahaya keamanan negara di wilayah terkecil di sebuah desa.

BAB VIII

SISTEM BUDAYA DAN ADAT

8.1. Sistem Budaya dan Adat

Sistem budaya dan adat adalah sebuah sistem dimana ketua adat dan ahli budaya setempat diwajibkan untuk memimpin kelestarian budaya baik bahasa, tarian, pakaian, serta tatacara upacara adat dipertahankan dan diaplikasikan serta ditransformasikan kepada generasi muda yang ada di desa tersebut. Ketua adat atau ahli budaya diangkat oleh pemerintah pusat untuk menempati pos di “kementerian budaya dan adat” di sebuah desa.

Sebuah negara akan menjadi besar dan dihargai oleh negara lainnya apabila mempertahankan adat-istiadat. Apabila kelestarian adat-istiadat dapat dijaga maka kearifan lokal lebih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan produktivitas kerja masyarakat. Misalnya, penggunaan baju adat dipakai pada saat acara resmi negara, di sekolah, di kantor, di manapun tempat yang pantas untuk dipakai di desa tersebut.

8.2. Mekanisme Manajemen Adat dan Budaya

Beberapa item yang penting dalam manajemen adat dan budaya terbagi menjadi tiga fase utama sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan dan transformasi budaya dan adat setempat dari generasi tua kepada generasi muda tentang segala hal yang berhubungan dengan sejarah wilayah setempat. Misalnya, sejarah desa atau kecamatan atau kabupaten/kota serta pernak-pernik baju adat, kesenian dan keunggulan budaya setempat. Pelatihan ini

dilakukan selama 3 (tiga) bulan bersamaan dengan pendidikan ketahanan cinta tanah air.

2. Mengimplementasikan adat dan budaya dalam bentuk pentas budaya, festival budaya, parade budaya, penjualan pernik-pernik ciri khas daerah yang dilakukan secara periodik setiap tahun 2 (dua) kali atau 4 (empat) kali. Dengan adanya hal ini akan menarik wisatawan domestik dan luar negeri, untuk dijadikan sebagai *income* bagi desa dan masyarakatnya.
3. Melestarikan bahasa setempat terutama yang “bahasa halus” atau bahasa kromo agar tidak hilang dan terpengaruh oleh budaya asing namun tetap menggunakan bahasa negara sebagai bahasa formal di sekolah atau kantor pemerintah sehari-hari. Baju adat juga harus dikenakan kepada anak-anak sekolah, aparat pemerintah, dan unsur-unsur masyarakat lainnya pada hari-hari tertentu.

Dari uraian ketiga fase di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Unsur budaya dan ekonomi menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan di era-globalisasi. Artinya walaupun persaingan antar negara mengutamakan modernisasi namun tetap mempertahankan budaya masing-masing. Pemasukan atau *income* yang dikelola oleh kepala desa dan unsur masyarakat lainnya akan menjadi *income* yang rutin setiap bulan atau bahkan setiap hari apabila menjual souvenir atau pernik-pernik yang lain.
- b. Rasa nasionalisme dan cinta tanah air akan lebih kuat dengan cara menunjukkan budaya masing-masing sebagai bagian dari bangga tanah air dan dari generasi-kegenarsi akan mengingat leluhurnya

dan secara teori sejarah budaya metode ini akan mampu mempertahankan peradaban manusia yang berbudaya tinggi.

- c. Kompetisi antara daerah atau antar desa menjadi semakin berkembang dengan mengeksplor potensi adat dan budaya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan latar belakang desa masing-masing.

BAB IX

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

9.1. Defenisi Manajemen Masyarakat Beragama dan Berkepercayaan

Yang dimaksud dengan manajemen beragama dan berkepercayaan menurut TEC adalah pengelolaan sebuah masyarakat yang memiliki agama dan kepercayaan yang sesuai dengan kepercayaan mereka masing- masing. Sebuah sistem masyarakat di setiap desa atau wilayah memiliki ciri khas masing- masing dan telah menjadi sebuah kebebasan menganut ajaran agama dan kepercayaan. Apabila ada yang tidak percaya kepada agama atau kepercayaan (atheis), dalam TEC, hal itu diserahkan kepada undang- undang di setiap negara masing- masing.

Pengelolaan masyarakat yang melaksanakan agama dan kepercayaan dapat dilakukan dengan cara memberikan kebebasan beragama namun tidak melanggar norma wilayah masyarakat setempat atau norma serta aturan negara. Hal ini untuk menjembatani bagaimana seorang yang memiliki agama dan kepercayaan melaksanakan aktivitas ibadah mereka masing- masing tanpa harus mengganggu atau mendeskreditkan agama dan kepercayaan lainnya. Sebagai dampaknya, suasana kondusif masyarakat dalam melaksanakan ibadahnya akan terjaga dengan baik. Mayoritas menjaga yang minoritas, dan minoritas menghargai yang mayoritas. Sehingga tidak ada intoleransi antar umat beragama yang berakibat konflik perang agama dan bahkan perang suku/etnis dan perang golongan yang akan berakibat kehancuran sebuah negara dan peradaban masyarakatnya.

9.2. Mekanisme Pengelolaan Masyarakat Beragama dan Berkepercayaan

Adapun beberapa hal yang penting yang dilakukan dalam mekanisme pengelolaan masyarakat beragama dan berkepercayaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kepala desa melaporkan secara rutin perkembangan pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan dari masyarakatnya misalnya, jumlah jama'ah yang shalat di masjid, orang yang beribadah di gereja, berdo'a di kuil dan tempat ibadah lainnya.
2. *Reward* akan diberikan kepada RT/RW yang paling banyak kegiatan ibadah misalnya, jumlah jama'ah yang shalat atau yang beribadah sangat signifikan sehingga memberikan suasana wilayah yang lebih sejuk serta produktif untuk kepentingan penguatan akhlak dan perilaku masyarakat negara.
3. Memberikan teguran atau hukuman kepada pengelola tokoh agama yang kurang mampu menggairahkan kegiatan agama atau sampai memicu masalah SARA, potensi perkembangan yang berbasiskan agama ataupun nilai-nilai yang dianut oleh sebuah negara akan memberikan dampak yang kuat terhadap produktivitas kerja masyarakat yang lebih elegan yang berdampak kepada dunia akhirat. Rasa simpati dan empati terhadap orang-orang miskin akan semakin terlihat nyata apabila nilai-nilai agama dan kepercayaan bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Negara juga akan lebih ringan tugasnya untuk memacu rakyatnya untuk melakukan kegiatan yang positif disegala bidang dan dibantu tokoh-tokoh agama, adat dan kepercayaan wilayah masing-masing setempat.

9.3. Dampak Agama dan Kepercayaan

TEC tidak lepas dari masyarakat yang agamis dan menuangkan setiap kegiatan yang berdampak makro bukan hanya untuk kehidupan di masa kini (dunia) tapi juga dampak kehidupan akhirat.

Toleransi antar umat beragama dan saling menghargai adalah kunci utama dalam TEC untuk membangun SDM yang berkualitas lahir dan batin. Negara dapat meningkatkan pendapatan nasional secara ekonomi dan juga meningkatkan indikator kebahagiaan secara spiritual dan ketenangan hati masyarakat dan negara.

BAB X

MANAJEMEN PENDIDIKAN

10.1. Definisi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan adalah sebuah proses untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi melalui sebuah sistem *online*, yang di *support* oleh negara dengan subsidi silang. Manajemen pendidikan ini merupakan mata rantai TEC yang mengutamakan SDM anak bangsa untuk menikmati pendidikan hingga perguruan tinggi dari bantuan negara dan subsidi silang. Subsidi silang adalah program TEC yang berasal dari kumpulan bantuan keuangan dari masyarakat desa yang mengalami surplus.

10.2. Mekanisme Manajemen Pendidikan

Adapun mekanisme manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap desa harus memiliki sekolah mulai dari PAUD sampai SMA/Sederajat dan setiap kecamatan memiliki perguruan tinggi berbasis riset.
- b. Apabila desa tidak mampu mendirikan SMA bisa bergabung dengan desa lain yang memiliki surplus secara ekonomi.
- c. Setiap kabupaten/kota wajib memiliki perguruan tinggi yang unggul ditingkat provinsi dan nasional.
- d. Setiap provinsi wajib memiliki perguruan tinggi unggulan tingkat internasional.

Dari uraian di atas setiap desa wajib memperhatikan masyarakatnya agar menjalani pendidikan secara terbuka untuk mempunyai SDM yang berkualitas. Namun masyarakat tidak dipungut biaya SPP dan bagi yang berprestasi akan dikirim kependidikan tinggi yang berkualitas internasional. Masyarakat tidak perlu resah memikirkan biaya pendidikan dan bagi keluarga yang tidak mau menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi akan diberikan sanksi oleh pemerintah.

Dalam secara peradaban umat manusia pendidikan adalah hal yang paling mutlak sebagai basis pengembangan sumberdaya manusia. Tanpa pendidikan yang maju sebuah negara akan mengalami kelesuan, semangat membangun bangsa dan membahayakan gairah generasi muda untuk bersaing dengan negara lain. Pendidikan adalah kewajiban setiap warga negara sejak berumur minimal lima tahun dan dievaluasi serta diberikan sistem yang kuat hingga menempuh pendidikan ini minimal strata dua. Dalam setiap warga negara diwajibkan untuk menempuh pendidikan hingga strata dua. Dan seluruh biaya semestinya ditanggung oleh negara. Pendidikan master mencetak SDM yang mampu berkompetisi dengan negara lain baik yang berbasis ilmu pengetahuan dan riset serta terapan. TEC meyakini setiap warga negara apabila didorong dan dipaksa serta difasilitasi akan meraih gelar keilmuan minimal strata dua. Bagi mereka yang tidak mampu secara IQ (tidak malas atau membangkang) akan diberikan jalur khusus hingga strata S2 tanpa harus kuliah diperguruan tinggi.

Bagi yang cacat atau lemah fisik dan mental akan diberikan jalur khusus sesuai kebijakan negara masing-masing. Namun yang perlu

digaris bawahi pendidikan dimulai dari PAUD hingga strata dua. Pendidikan bukan terletak pada IQ namun juga harus seimbang (50% : 50%) dengan pendidikan moral untuk mencintai negara dan sesama serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Mata pelajaran atau mata kuliah harus mengikuti pola 50% : 50% yaitu 50% pendidikan umum, dan 50% pendidikan keilmuan, agama, adat budaya dan rasa mencintai umat manusia.

Dengan porsi kurikulum tersebut di atas akan dibuat percepatan yang luar biasa di bidang SDM untuk mengoperasikan sistem TEC secara maksimal karena generasi muda sudah dibekali keilmuan yang kuat secara umum pengamalan agama yang lebih kongkrit di masyarakat terutama membantu sesama, menghormati orang tua mempunyai sikap toleransi yang tinggi serta memiliki pengetahuan yang kuat tentang negaranya adat budayanya hingga melahirkan generasi yang cinta tanah air membela negaranya menghormati dan menjunjung tinggi adat dan budayanya serta menangkal, korupsi, terorisme, nepotisme, sparatisme dan unsur negatif lainnya yang akan menghancurkan bangsa dan negara.

BAB XI

MANAJEMEN TERINTEGRASI SEMUA SISTEM

11.1. Definisi dan Mekanisme Manajemen Terintegrasi

Yang dimaksud dengan manajemen terintegrasi semua sistem dalam TEC adalah sebuah mekanisme yang terpusat secara *online* yang dikendalikan oleh pusat dan dibantu pada tiap propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam mengendalikan dan merealisasikan 5 (lima) pilar TEC.

Adapun mekanisme terintegrasi adalah aliran semangat bangkit untuk berkarya bagi negara dan setiap setiap warga negara dengan urutan sebagai berikut:

- a. Setiap warga melapor ke RT (Rukun Tetangga)- nya baik sebagai sebuah kewajiban bagi warga negara setiap bulannya.
- b. Pihak RT (ketua RT) dan perangkatnya melaporkan kepada pihak RW (Rukun Warga) perkembangan wilayahnya disemua aspek.
- c. Setiap RW melaporkan kepada kepala desa perkembangan wilayah RW-nya di semua aspek TEC
- d. Setiap desa (kepala desa dan jajarannya) melapor perkembangan desanya kepada kecamatan
- e. Setiap kecamatan melapor kepada kabupaten/kota
- f. Kabupaten/kota melapor kepada propinsi dan
- g. Propinsi melapor ke pusat
- h. Pusat melapor ke rakyat

Selanjutnya struktur manajemen terintegrasi yang ada di desa minimal ada 5 bidang kementerian yang membantu kepala desa dalam menegakkan lima pilar TEC, di antaranya:

1. Menteri SDM dan Agama
2. Menteri ekonomi, SDA dan teknologi
3. Menteri Pendidikan dan Adat Budaya,
4. Menteri Pertahanan dan Keamanan
5. Menteri Administrasi dan Hukum

11.2. Poin Penting dalam Manajemen Terintegrasi

Ada beberapa poin penting dalam TEC untuk menunjang terlaksananya manajemen terintegrasi di antaranya:

1. Sumber daya manusia (SDM), artinya semua jajaran yang ditunjuk oleh negara dalam struktur pemerintahan harus memiliki kontrak konstitusi dengan negara yaitu mematuhi semua aturan negara yang dibuat dalam sistem TEC demi percepatan ekonomi, pertahanan ekonomi, peningkatan kualitas SDM baik dibidang pendidikan maupun moral serta budaya, dan tentu saja pertahanan keamanan, anti terorisme, anti korupsi, anti separatisme, serta aspek lainnya dalam TEC.
2. Perangkat lunak dan keras yang disediakan negara serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di setiap titik desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pusat.
3. Ketersediaan anggaran untuk membiaya operasional SDM dan sistem yang nantinya apabila sistem berjalan akan berdampak terhadap lipat gandaan penghasilan negara dan masyarakat serta

tingkat kondusif keamanan dan mampu menghadapi persaingan ekonomi global baik secara materi maupun non materi

4. *Reward* dan *punishment* dalam sistem ini yang berjalan setiap detik. Artinya bagi aparat pemerintah yang ditunjuk oleh negara mengelola sistem TEC apabila mampu meningkatkan produktivitas di wilayahnya baik secara ekonomi maupun non ekonomi akan diberi *reward* yang pantas misalnya, bonus dari pusat maupun penghargaan dalam bentuk uang maupun yang lainnya serta apresiasi pemberian dari daerah lainnya. Demikian pula setiap warga negara yang memiliki produktivitas dan progres yang positif dalam membangun ekonomi bangsa dan non ekonomi akan diberikan penghargaan oleh negara maupun masyarakat dari daerah tersebut maupun dari daerah lain. Di sini posisi setiap warga negara adalah sama kedudukannya sebagai pejuang bangsa dan negara tanpa memandang jenis pekerjaan, kaya atau miskin, bodoh atau pintar, cacat atau tidak cacat, yang penting mereka berprestasi akan diberi *reward* yang pantas. Namun demikian apabila pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah tidak sesuai dengan mandat maka akan diberi *punishment* atau hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
5. Setiap warga negara memiliki *handphone* (HP) sebagai alat penghubung sistem yang dapat melaporkan perkembangan semua aspek di wilayah RT/RW, desa dan semua wilayah. Sehingga setiap warga negara bisa membantu atau menolong orang lain yang kelaparan, kekurangan, dan penderitaan lainnya secara cepat dengan melihat alarm sistem yang ada pada HP masing-masing warga negara. Dengan demikian kebohongan publik, korupsi, teroris me,

dan penderitaan sesama warga negara dapat dilihat secara *online* setiap saat. Apabila ada warga negara yang kelaparan di sebuah desa tidak dibantu oleh desa sebelah yang surplus maka desa yang surplus akan dihukum oleh negara.

6. Evaluasi semua sistem mulai dari ekonomi, pendidikan, pertahanan, agama, budaya, dan aspek lainnya akan menjadi hal penting dan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan sehingga diharapkan program TEC akan terus berjalan sesuai dengan haluan negara yang berbasiskan undang-undang.

BAB XII

MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

12.1. Definisi Manajemen Teknologi Informasi

Yang dimaksud dengan manajemen teknologi adalah setiap masyarakat mampu menggunakan teknologi yang disediakan oleh negara untuk melaporkan produktivitas kerja setiap bulan. Di era informasi dan teknologi sekarang ini anak-anak generasi muda sudah tidak asing lagi menggunakan internet dan media sosial. Kenyataan inilah yang diyakini TEC bahwa setiap warga masyarakat mampu mengoperasikan alat yang disediakan oleh pemerintah yang berupa *handphone* (HP) atau media elektronik lainnya seperti komputer, laptop atau tablet.

Di era yang serba terbuka ini masyarakat negara yang ingin menang dalam kompetisi di tingkat global harus mampu menguasai teknologi untuk komunikasi diberbagai sektor, termasuk kewajiban pelaporan produktivitas kerja kepada negara setiap bulan. Dengan adanya input pelaporan ini negara lebih mudah mengawasi perkembangan masyarakatnya dan mengantisipasi masalah-masalah yang timbul terhadap 5 (lima) pilar TEC.

12.2. Mekanisme Manajemen Informasi dan Teknologi

Negara memberikan fasilitas berupa *handphone* (HP) atau media elektronik lainnya kepada setiap warga negara atau setiap warga negara harus memiliki alat tersebut (kalau mampu membeli). Dengan adanya alat ini akan memudahkan sistem pelaporan *online*. Di samping itu setiap

warga masyarakat juga dapat melihat perkembangan kondisi tetangganya dilayar *handphone* (HP) tentang kondisi keamanan di wilayah sekitar kejadian kriminalitas dan juga orang-orang atau tetangga yang kekurangan makan, orang yang sedang sakit dan butuh bantuan serta kondisi kemanusiaan lainnya yang membuat setiap warga negara berhak dan wajib membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan pertolongan tersebut dengan cepat sehingga timbullah motto “berlomba- lomba dalam kebaikan”.

Kebaikan seseorang untuk menolong sesama di wilayah terkecil di dekatnya bahkan mungkin dapat menolong warga desa lain, kecamatan lain, kabupaten/kota lain dan propinsi lain sehingga akan menjadi poin tersendiri bagi warga yang menolong tersebut. Poin telah membantu orang lain akan mendapatkan penghargaan atau *reward* dari kepala desanya ketua RT/RW-nya atau bahkan bisa saja *reward* dari pemimpin negara. Negara tidak memandang apakah warga negara tersebut ikhlas atau tidak tetapi negara wajib mengapresiasi tindakan warga yang melakukan tindakan positif tersebut. Apabila warga tidak mau pamer kebaikannya dan hanya ingin dicatat oleh Tuhan dan malaikatnya namun tetap saja TEC akan memberikan sertifikasi poin kebaikan yang bisa dikumpulkan pada suatu saat dapat ditukar dengan nilai materi atau kemudahan lainnya dari negara dan masyarakat.

Dengan demikian kemungkinan kecil orang yang kelaparan, orang sakit namun tidak punya biaya untuk berobat, kekurangan biaya pendidikan untuk sampai tingkat perguruan tinggi, pengangguran, perkelahian antar suku dan golongan bahkan terorisme bisa dicegah secepat mungkin. Karena setiap warga negara adalah tangan-tangan negara yang diakui secara hukum dan undang- undang berhak membela

bangsanya dan masyarakatnya yang membutuhkan, dan tentu saja keluarga inti dari setiap warga yaitu orang tua ibu dan anak juga menjadi prioritas utama.

Setiap permasalahan apapun baik material maupun psikis dapat dibantu secara gotong royong oleh warga lainnya.

123. Penguatan Basis Informasi dan Teknologi

Setiap warga negara wajib mengikuti pelatihan teknologi dan informasi minimal selama tiga bulan pada saat seorang warga berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian dapat diharapkan penguasaan teknologi dan informasi dapat dijadikan sebagai menu utama dalam pergerakan yang lebih positif pada sistem TEC.

Setiap warga negara berhak dan wajib mengembangkan teknologi dan informasi sesuai dengan kondisi wilayah mereka. Misalnya di sebuah desa mampu mengembangkan teknologi bertenaga angin yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik, pertanian, perternakan, perikanan dan sektor lainnya. Dengan adanya percepatan teknologi setiap desa bahkan setiap RT dapat menopang kesuksesan ekonomi dan aspek 5 (lima) pilar lainnya.

Apabila sebuah desa belum mampu mengembangkan teknologi tepat guna maka akan dibantu oleh desa lain serta anggaran dari pemerintah pusat. SDM yang mengelola teknologi dapat diperbantukan di wilayah desa lainnya atau relawan yang berasal dari wilayah lainnya di negara tersebut.

BAB XIII

KERJASAMA DENGAN NEGARA LAIN DAN WARGA INTERNASIONAL

13.1. Definisi Kerjasama Dengan Negara Lain dan Warga Internasional

Dalam TEC kerjasama luar negeri adalah mutlak harus dilakukan untuk menjaga stabilitas internasional dan pergerakan ekonomi yang berskala global dengan prinsip saling menguntungkan tanpa tekanan dan paksaan antara negara-negara yang bekerjasama tersebut. Di samping itu transformasi perekonomian global di era globalisasi tidak dapat dicegah sehingga diperlukan ketahanan khusus dalam bidang politik, budaya, pertahanan keamanan, kesehatan, pertanian, pariwisata, pendidikan dan bidang-bidang lainnya.

Negara yang kuat secara ekonomi dan SDM akan lebih dipandang dan dihargai oleh negara lain dari pada negara yang lemah secara ekonomi dan SDM-nya. Namun dalam TEC negara yang sudah mengalami surplus secara ekonomi berhak dan wajib membantu negara yang minus secara ekonomi dengan prinsip saling membantu antar umat manusia tanpa tekanan politik dan *new colonialism*.

13.2. Mekanisme Kerjasama Negara Lain dan Warga Internasional

Seorang kepala negara dengan persetujuan Senat dapat mengajukan kerja sama antar negara di bawah MOU (*memorandum of understanding*) serta nota kesepahaman lainnya. Butir-butir atau poin-poin yang penting dalam kerja sama antara lain:

1. Penguatan kualitas sumberdaya manusia yaitu dengan jalan pertukaran tenaga ahli, pelatihan, pendidikan dan lain sebagainya. SDM yang berkualitas di sebuah negara jangan sampai di *hire* atau dipekerjakan oleh negara lain yang berakibat kerugian negara tersebut. Untuk itu negara harus menghormati dan mengapresiasi SDM yang berkualitas yang ada di negaranya sehingga tidak terjadi *brain drain* ke negara lainnya.
2. Investasi dan perekonomian bidang ini adalah upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan peluang investasi dari luar negeri untuk sektor-sektor yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan perjanjian yang tidak merugikan antara kedua belah pihak. Potensi investasi asing diusahakan tidak merusak investasi dalam negeri dan merugikan masyarakat dalam negeri misalnya, ada pembatasan berapa persen investasi yang boleh masuk tanpa harus dimonopoli oleh pihak asing.
3. Penguatan kerjasama di bidang pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas SDM, negara harus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dibagian riset maupun terapan dan hal ini berdampak terhadap kerja sama antar universitas dalam negeri dan luar negeri, pengiriman lembaga riset, generasi muda untuk mendapatkan pendidikan diluar negeri tanpa harus meninggalkan kekuatan atau budaya yang ada didalam negeri.
4. Penguatan kerjasama di bidang keamanan, pertahanan, hukum, dan bidang lainnya sesuai dengan 5 (lima) pilar TEC yang saling menguntungkan dan menghormati antar negara dan masyarakat internasional.

BAB XIV

MANAJEMEN SUMBERDAYA ALAM

14.1. Definisi Manajemen Sumberdaya Alam

Dalam TEC sumberdaya alam atau selanjutnya disingkat dengan SDA adalah bagian yang *urgen* untuk dikelola secara benar oleh negara dan hanya demi kepentingan rakyatnya bukan segelintir orang atau kelompok apalagi untuk kepentingan asing. Kesalahan pengelolaan SDA yang dapat berakibat kehancuran ekonomi sebuah negara dan penjajahan ekonomi model baru. Misalnya terlalu banyak memberikan peluang kepada investor asing untuk mengelola sebuah pulau, merentalkan sebuah pulau, mengelola pertambangan, pertanian, perikanan, dan kelautan dan hasil bumi lainnya termasuk hutan dengan tanpa ada batasan yang jelas atau porsi luar negeri terlalu banyak dibandingkan dengan porsi dalam negeri.

SDA merupakan unsur ekonomi yang sangat penting selain SDM karena nilai ekonomis SDA sangat berdampak kepada kesejahteraan sebuah rakyat negara dan sudah semestinya negara memiliki otoritas tertinggi untuk mengelola SDA dibandingkan swasta. Umur bumi dan hasil alam sangat terbatas bukan? Sehingga pemerintah harus jeli dan berani mengatur otoriter SDA dan hasil bumi lainnya tanpa tekanan dari negara asing.

14.2. Mekanisme Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA)

Untuk mengelola sumberdaya alam oleh negara secara benar dalam TEC sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan undang-undang negara yang baku untuk jangka waktu yang tak terbatas dan disahkan oleh Senat atau Dewan Rakyat dan sifat hukumnya tidak bisa diganggu gugat yaitu pengelolaan SDA mutlak dan otoritasnya tertinggi di tangan negara.
- b. Implementasi hukum dan pengawalan undang-undang tersebut harus ketat tanpa pandang bulu bagi mereka yang melanggar undang-undang tersebut. Misalnya ada pihak asing yang memaksa untuk mengelola pertambangan emas, batu bara, atau minyak yang ingin dikuasai oleh negara lain. Porsi yang benar semestinya maksimal 40% adalah pihak asing dan porsi negara tersebut harus di minimum 60%. Apabila negara lain memaksa jumlah prosentase lebih besar dari pada negara tersebut maka pemerintah harus berani membatalkan perjanjian pengelolaan SDA atau dicari solusi lain boleh berinvestasi disektor yang lain tanpa merugikan negara.
- c. Pemerintah daerah yang paling kecil sekalipun juga harus berani melaporkan apabila ada pihak asing yang terlalu menguasai atau terlalu mengendalikan bisnis SDA. Pemerintah desa misalnya, harus segera melaporkan apabila ada gejala pihak asing ingin menguasai SDA di wilayahnya. Bagi kepala desa yang berani melaporkan dan memang harus demikian maka pemerintah pusat harus langsung memberi *reward* kepada kepala desa tersebut.
- d. Masyarakat juga harus ikut berperan dan berani melaporkan kepada pihak pemerintah setempat agar tidak terjadi invasi ekonomi dari luar negeri.

Keempat poin di atas adalah tulang punggung pengaman awal SDA sebuah negara yang menjadi basis pengelolaan ekonomi sebuah negara. Untuk selanjutnya setelah mekanisme pengaman tersebut berjalan dengan baik maka pemerintah dapat mengelola SDA dengan efektif dengan strategi sebagai berikut.

1. Di setiap RT dipetakan kekuatan SDA yang ada misalnya lahan pertanian cocok untuk tanaman apa saja. Sektor perternakan yang dapat dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan kombinasi daur ulang kompos dan hal- hal lain yang menjadi simbiosis mutualisme antar perternakan dan pertanian. Pemetaan ekonomi yang ada di setiap RT berbasis SDA yang ada sangat berpengaruh terhadap penentuan fokus pengolaan SDA dengan otoritas tertinggi ditangan negara untuk mengalokasikan seluruh kekuatan teknologi, informasi, riset, proyeksi ekonomi dan usaha setiap warga secara maksimal. Pemetaan perikanan, kehutanan, pertambangan, kelautan dan segala potensi SDA yang ada harus diadministrasi dengan rapi sebagai *asset* negara dan *asset* masyarakat serta dipaparkan secara *online* setiap saat perkembangan produktivitas pengolaannya.
2. Negara harus membagi tanah yang ada di setiap RT dengan porsi yang seimbang yaitu kepemilikan tanah negara harus mayoritas dan masyarakat yang memiliki tanah dibatasi untuk mencegah terjadinya monopoli, terjadi pengelolaan SDA baik dari swasta dalam negeri dan investor luar negeri. Penguasaan tanah-tanah tersebut agar memudahkan negara mengelola secara maksimal seluruh produktivitas yang ada dengan berbagi pengelolaannya dengan masyarakat setempat sehingga negara lebih mampu

memakmurkan rakyatnya tanpa kesulitan dalam pendistribusian kesejahteraan. Dengan catatan negara harus profesional dan transparan untuk melaporkan setiap perkembangan data-data ekonomi, ketenagakerjaan dan arus investasi kepada masyarakat baik pelaporan kepada masyarakat maupun investor asing.

3. Bantuan keuangan atau modal, teknologi serta tenaga kerja yang profesional dapat dilakukan dengan sistem subsidi silang dari wilayah desa lain atau Kecamatan lain atau Kabupaten lain atau Propinsi lain untuk manajemen pengelolaan di setiap RT yang ada di setiap desa.

BAB XV

MANAJEMEN KESEHATAN

15.1. Definisi Manajemen Kesehatan

Dalam TEC kesehatan adalah tulang punggung yang penting bagi produktivitas kerja masyarakat dan aparatur negara untuk selalu memperhatikan kesehatan yang berdampak jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memantau kesehatan setiap warga secara maksimal dan itu merupakan tanggung jawab negara dalam melayani kesehatan masyarakat secara optimal tanpa memandang perbedaan sikaya dan simiskin serta perbedaan lainnya.

Tanpa masyarakat yang sehat di sebuah negara akan mengakibatkan dampak buruk pada kinerja masyarakat dan aparatur negara. Proses pelayanan kesehatan dilakukan 24 (dua puluh empat) jam oleh pemerintah dan disediakan dokter-dokter umum dan spesialis serta ahli kesehatan lainnya di setiap desa dan bila memungkinkan di setiap RT/RW.

15.2. Mekanisme Manajemen Kesehatan

Beberapa poin penting dalam mekanisme manajemen kesehatan TEC di antaranya sebagai berikut:

1. Program sehat secara fisik dan mental adalah program utama yang diberikan kepada masyarakat di setiap desa melalui pendirian posko kesehatan terkendali *online* dan *mobile* untuk melayani masyarakat di pelosok dan perkotaan.
2. Mengirim dan memantau dokter-dokter dan ahli kesehatan di

setiap desa dan ahli medis khusus mentalitas misalnya psikiater, ahli kejiwaan dan ahli spiritual untuk membantu persoalan medis non-fisik.

3. Membuat dan membangun posko-posko kesehatan di setiap RT/RW dan melayani 24 (dua puluh empat) jam *online* sehingga masyarakat yang sakit dan membutuhkan tindakan yang cepat bisa langsung dilayani tanpa menunggu administrasi yang terlalu birokratif yang sering memakan korban orang-orang miskin dan tak mampu membayar biaya pengobatan serta biaya lainnya misalnya rawat inap.
4. Volunter atau sukarelawan misalnya dari mahasiswa atau siswa yang telah lulus tes pendampingan kesehatan atau ditunjuk untuk menjaga dan membantu problem kesehatan di setiap RT/RW.
5. Anggaran kesehatan di setiap desa disesuaikan dengan kemampuan pemasukan setiap desa untuk melayani kesehatan masyarakat dan tentu saja pemerintah harus mengeluarkan anggaran khusus untuk program TEC kesehatan ini. Bagi desa yang surplus secara ekonomi dan sudah sejahtera diharuskan membantu desa yang minus secara ekonomi khususnya bantuan anggaran atau pelaksana pelayanan di desa yang minus tersebut.
6. Laporan *online* dari setiap petugas kesehatan di setiap RT/RW sangat vital dan diperlukan oleh pusat kesehatan di setiap desa hingga dilaporkan ke pemerintah pusat. Apabila tidak ada laporan *online* misalnya daerah tersebut masih sulit *signal internet* atau HP maka dapat dilaporkan secara manual dalam bentuk *Hardcopy* maupun *softcopy* yang diberikan kepada struktur pemerintahan dari desa hingga pusat.

Bagi yang menjalankan pelayanan kesehatan di RT/RW dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati maka akan diberi *reward* sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan masyarakat yang *care* atau peduli dengan kondisi kesehatan baik dikeluarganya maupun tetangganya akan diberi *reward* yang pantas sesuai dengan hukum TEC. Proses pengembangan kesehatan dapat dilakukan melalui alternatif kesehatan non- medis misalnya akupunktur, pijat refleksi dan pemberian obat alami seperti tanaman atau herbal sesuai dengan kondisi masing- masing wilayah desa setempat. Hal ini akan menjadi sangat positif untuk memacu pertumbuhan kesehatan melalui kearifan lokal yang ada di wilayah desa masing-masing.

BAB XVI

ANTISIPASI SISTEM ONLINE MENGALAMI KEMACETAN

16.1. Definisi Antisipasi Online Mengalami Kemacetan

Sistem TEC memang berbasis *online*. Namun apabila sistem TEC mengalami hambatan terutama apabila terjadi kemacetan jaringan internet atau gangguan satelit atau kendala lainnya, sistem harus harus berjalan. Oleh karena itu antisipasi kemacetan *online* adalah alternatif yang dilakukan adalah pelaporan secara berkas manual yang dapat didistribusikan melalui transportasi darat atau laut dan udara.

16.2. Mekanisme Antisipasi Sistem Online

Adapun beberapa poin penting dalam antisipasi kemacetan *online* adalah sebagai berikut:

1. Negara menyediakan komputer atau laptop serta printer dan bahan formulir pelaporan yang dapat diisi setiap bulan oleh masyarakat dan aparatur pemerintah. Formulir dapat disediakan di setiap RT/RW, desa dan struktur pemerintahan hingga pusat dengan prinsip transparan dengan komitmen yang tinggi untuk membangun negara secara totalitas.
2. Negara dapat memanfaatkan sekolah dan siswanya serta kampus beserta mahasiswanya untuk menjadi pahlawan-pahlawan negara untuk membantu pelaporan setiap warga dan aparat pemerintah.
3. Berkas laporan yang teratur setiap bulan diduplikasi atau di fotocopy di setiap RT/RW dan desa hingga struktur pemerintah pusat. Sistem *check* dan *recheck* sangat penting untuk menilai

laporan secara transparan dan tidak mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan negara.

4. Pemberian *reward* dan *punishment* bagi pahlawan-pahlawan negara yang membantu proses pelaporan manual juga disediakan setiap bulan oleh negara.

Memang apabila dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang lama namun substansi isi pelaporan dan semangat membangun negara adalah kunci utama dalam mencapai kekuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Jadi bukan alasan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk tidak menyumbang tenaga, pikiran dan produktivitas kerjanya dalam membangun sebuah negara yang besar dan makmur dalam arti sebenarnya.

BAB XVII

PENUTUP

Sistem TEC tidak dirancang untuk negara yang tidak mempunyai komitmen untuk membangun percepatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara material maupun spiritual. Pemimpin-pemimpin negara yang berjiwa besar dan mengerti akan pentingnya mencegah kehancuran ekonomi dan peradaban di suatu negara dari derasnya arus persaingan ekonomi global yang tidak dapat dibendung oleh siapapun juga diseluruh penjuru di muka bumi ini.

Keserakahan dan ketamakan ekonomi manusia yang tidak dapat dibendung yang selalu mengutamakan dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain yang terbungkus dalam *High Technology* yang saat ini menjadi penyakit akut bagi setiap anak manusia yang lahir di dunia ini. Hal ini dikarenakan generasi saat ini (abad XXI) begitu terlahir sudah disuguhi oleh fasilitas teknologi berupa *handphone* (HP) dan internet. Dan hal ini sering kali menjadi dinding pemisah untuk menutup mata dan hatinya untuk penderitaan orang lain. Dengan hadirnya TEC, manusia bukan diperbudak teknologi tapi teknologilah yang diperbudak manusia untuk membangun infrastruktur demi kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Hanya pemimpin-pemimpin negara di dunia ini dan anggota dewan yang berani dan terbuka hatinya untuk mengeksekusi pelaksanaan sistem TEC di negaranya dengan sistem satu komando atau otoriter kerakyatan yang sifatnya otoriter hanya untuk kepentingan masyarakat negaranya, *Multiplier effects* pelaksanaan TEC berdampak positif berupa kedamaian

dan saling membantu untuk masyarakat negara lainnya di saat peradaban bumi yang sudah sangat tua dan rentan akan kehancuran peradaban umat manusia dikarenakan perang, terorisme, separatisme, radikalisme dan unsur negatif lainnya.

Hanya pemimpin negara yang berani di sebuah negara yang akan berani membuat undang-undang TEC di mana bila ada sekelompok orang atau masyarakat yang melawan otoritas negara berarti dianggap melawan negara. Terlepas dari itu, TEC memiliki kekurangan namun TEC dihadirkan untuk menjadi solusi alternatif strategi manajemen percepatan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM sehingga akan membentuk negara yang *super power*, kuat dalam arti yang sebenarnya, damai, penuh rahmat, dan warga negaranya bahagia secara materi maupun spiritual, di bawah kendali pemimpin yang berani dan adil serta siap melayani rakyatnya di siang dan malam tanpa pamrih apapun kecuali hanya minta balasan dari Tuhan dan alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Altaf, Z. (2009). *Economicmanagement: Dreams and Shop*. Pakista: The university of Michigan.
- Amstrong, S. J. (2009). *Management Learning Education and Development*. London: ltd. Iollivers.
- Banjong, Delphine Nand Olson, MyrnaR. (2016). Issues and Trends of International Students in the United States. *International Journal Of Education*, 4(1).
- Baron, L. R. (2008). *An Essay on The Nature & Significance of Economic Science*. California: Macmillan & Co., Limited.
- Barro, R. J. (1997). *Macroeconomics*. America: United States of America.
- Becker, G. S. (2008). *Ekonomic Theory*. London: Alnine Transaction
- Berns, R. M. (2016). *Child, Family, School, Community*. USA: Beth Chapple.
- Bhatia, V. P. (2016). *Ethical and Spiritual Values in Indian Scriptures*. Chennai: Notion Press
- Blaug, M. (2003). *Ekonomic Theory in Retrospect*. Australia: Cambridge University Press.
- Booth, R., & Zhang M. (2016). *Pricai 2016: Trends in Artificial Intelligence*. Thailand: Springnger.
- Capello, R. (2007). *Regional Economics*. New York: Routledge.
- Casson, M. (2003). *The Entrepreneur An Economic Theory, Second Edition*. USA: Edward Elgar.

- Cernahan, M. (2004). *Reforming Fiscal and Economic Management In Afganistan*. Afganistan: Islamic Republic of Afganistan.
- Chappell, L. (2012). *Germany Poland and the Common Security and Defence Policy*. England: CPI Antony Rowe.
- Concelcao, S. C. A., & Lehman, R. M. (2011). *Manging Online Instructor Workload*. San Fransisco: Jhon Wiley and Sons.
- Couloumbis, T. A., & Hastings, W. J. (2010). *Introduction to International Relations: Power and Justice*. India: Indiana University.
- Deborah, N. G. 2012. *Online Community Management*, Canada, John Wiley dan Sons.
- Denise N. B., & Mantzikos, L. (2015). *Al Qaeda The Transformations of Terrorism in The Middle East and North Africa*. California: Praeger.
- Dwivedi, D. N. (2010). *Macroeconomics Theory and Policy*. Delhi: Tata McGraw Hill.
- Dwivedi, D. N. (2010). *Macroeconomics Theory and Policy*. New York: Ata Megraw.
- Fecht, F., Grüner, H. P., & Hartmann, P. (2012). Financial Integration, Specialization And Systemic Risk. *Working Paper Series*, 5(3), 245-257.
- Filc, W., & kohler C. (1999). *Macroeconomic Cause of Unemployment: Diagnosis and Policy Recommendations*. Berlin: Dunker & Humblot.
- Fratiani, M. U., Salvatore., & Hagen J. V. (1997). *Macroeconomic Policy In Open Economies*. London: Greenwood Press.
- Fristone. (2006). *Regional Economic Development*. California: University of Ottawa Perss.

- Furseth, I., & Repstad, P. (2006). *An Introduction to the Sociology of Religion*. USA: Ashgate.
- Gad, K. (2015). The Impact of Political Advertising through Social Networking Sites on Egyptians' Political Orientations and Choices. *International Journal of Information, Business and Management*, 7(1),1-18.
- Geoffery. (2013). *Seapower A Gulde for thetwenty Frisit Century*. Canada: Routledge.
- Ghosh, C. (2011). *Macro economics*. New Delhi: Asok k Ghosh.
- Gorden, R. J. (2012). *Macro Economic edition 12*. England: Addison-Wesley.
- Gupta, G. S. (2006). *Macroeconomic Theory and applications*. New Delhi: Tata McGraw Hill.
- Haftel, Y. Z. (2012). *Regional Economic Institutions and Conflict Mitigation*. As: University of Michigan Press.
- Haselby, S. (2015). *The Origins of American Religious Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Heidenkamp, H., & Taylor, T. (2013). *The devence industrial triptych*. Canada: Adrian Jhonson and Ashlee Godwin.
- Henddderson, J. V. (2004). *Handbook of Regional and Urban Economics*. London: Elsevier North Holand.
- Henderson, D. R. (2011). *The Concise Encyclopedia of Economics*. California: Liberty Fund.
- Ho, L. (2003). *Exchage Rate Regimes and Macroeconomic Stability*. London: Kluwer Academic Publishers.
- Hodges, N. W. (2011). *The Economic Management of Physical Assets*. London : Mechanical Engineering Publications.

- Howorth, J. (2014). *Security and Defence Policy in the European Union*. New York: Palgrave Macmillan.
- Huey, L., & Witner, E. (2016). Exploring a new role for women in terrorism. *Journal of Terrorism Research*, 7(1), 11-19.
- Jacobs, J. J. (1994). *Systems of Survival: A Dialogue on the Moral Foundations of Commerce and Politics*. American Cities: Vintage Books.
- Jha, R. (1994). *Macroeconomic For Developing Countries*. London: Routledge.
- Karau, E. (1998). *Social and Economic Management In the Competitive Society*. London: Kluwer Akademik.
- Kingsbury, D. (2015). *Territorial Separatism in Global Politics Causes, Outcomes and Resolution*. New York: Routledge.
- Klinger, K. (2010). *Learning Management System Technologiess and Software Solutions for Online Teaching: Tools and Applications*. New York: IGI Global.
- Krugman, P. (1997). *Development, Geography, and Economic Theory*. London: The MIT Press.
- Langan, J. (2013). *College Writing Skills with Readings*. New York: Ninth Edition.
- Lothian, J. R. (2012). Financial flows, financial crises, and global imbalances. *Journal of International Money and Finance*, 31(3), 469-480.
- Macdonald, S. (2015). Undesirable Heritage: Fascist Material Culture and Historical Consciousness in Nuremberg. *International Journal of Heritage Studies*, 12(1), 9-28.

- Mahajan, N., & Verma, S. (2014). Financial Development and Economic Growth: A Case of Indian Economy. *International Journal of Economics, Finance and Management*, 3 (1), 15–21.
- Malkiel, B. G. (2013). Asset Management Fees and the Growth of Finance. *Journal of Economic Perspectives*, 27(2), 97-108.
- Marone, F. (2016). Italian jihadists in Syria and Iraq. *Journal of Terrorism Research*, 7(1), 20-35.
- Maziere, C. (2015). Artistic Education in France: From the State to the Classrooms' Practices. *International Journal of Education & the Arts*, 16 (23), 1-19.
- McCann, P. (2013). *Modern Urban and Regional Economics*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Mickolus, E. (2016). *Terrorism 2013-2015 A Worldwide Chronology*. North Carolina: Mcfarland & Company, Inc., Publishers.
- Molochny, B. (2009). Essay on International Financial Crisis and Endogenous Growth Theory. *International Journal of Economic Sciences and Applied Research*, 2, (1), 7-15.
- Morishima, M. (2000). *The Theory of Modern Society*. New York : Cambridge University Press.
- Neuberger, D., & Rissi, R. (2014). Macroprudential Banking Regulation: Does One Size Fit All?. *Journal of Banking and Financial Economics*, 1(1), 5-28.
- Percoco, M. (2013). *Geography institutions and regional economic performance*. New York: Ricardo Crescenzi.
- Perman, R. (2003). *Natural Resource and Environmental Economics*. Britania: Pearson Education.

- Perrin, D. G. (2015). Artificial Intelligence. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 12(1), 1-15.
- Pokalova, Elena. (2015). *Chechnya's Terrorist Network The Evolution of Terrorism in Russia's North Causasus* . California: Praeger.
- Rani, S. (2009). *Regional Economic Integration*. Delhi: G. Print Procss.
- Riseman, N. (2016). *In Defence of Country*. Australia: ANU Press and Aboriginal History Ine.
- Romero, A., & Lefebvre, E. (2015). Special Issue on Information Technology and Complexity Management. *International Journal of Information Technology and Management*, 14(2/3), 97-123.
- Ryan, M. (2014). *Unlocking Constitutional and Administrative Law*. New York: Routledga.
- Samuelson, P. A. (1983). *Foundationsof Economic Analysis*. American: Harvard University Press.
- Saraka, N. (2016). History of Terrorism in India: An analysis. *International Journal of Applied Reseach*, 2(2), 157-161.
- Schwodiauer, G. (2009). *Equilibirium and Disequilibrium in Economic Theory*. USA: D. Reidel Publishing Company.
- Scitovsky, T. (2003). *Economic Theory and Western European Integration*. New York: Routledge.
- Seck, D. (2014). *Regional Economic Integration in West Africa*. New york: Crepol.
- Shola, Olanrewaju Jhon, 2015, Globalization of Terrorism: A Case Study of Boko- Haram in Negeria. *International Journal of Politics and Good Governance*, 6(6.1), 1-22.
- Tavory, I. (2016). *Summoned Identifikation and Religious Life In A Jewish Neighborhood*. London: The University of Chicago Press.

- Thompson, W. C. (2016). *The World Today Series*. Canada: Rowman and Littlefield.
- Tin, L., Ivana, B., Biljana, B., Ljubica, I. B., Dragan, M., & Dušan, S. (2014). *Geographica Pannonica. Predatory and Fake Scientific Journals/Publishers – A Global Outbreak with Rising Trend: A Review*, 18(3), 69-81.
- Veldkamp, L. L. (2011). *Information choice in macroeconomics and finance*. New Jersey: Princeton University Press.
- West, S. R. (2016). *Neighborhood Watch*. London: Museitup Pub.
- White, Jonathan R. (2015). *Terrorism and Homeland Security*. Boston, USA : Cengage Learning.
- Whitmarsh, D. (2011). *Economic Management of Marine Living Resources*. Wangsinton DC: Earthscan.
- Widyastuti, A. R. (2015). Protection against Women from the Perspective of Working of Law in Society. *The International Journal Of Humanities & Social Studies*, 3(4), 199-208.
- Wilkinson, P. (2011). *Terrorism Versus Democracy*. New York: Routledge.
- Williamson, S. D. (2013). *Macroeconomics always learning*. Pearson: London.
- Xia, H. (2015). Coping With Emerging and Advanced Market Risks. *International Journal of Economics & Social Science*, 5, 18–40.

GLOSARIUM

1. **Lima pilar utama indikator TEC** yaitu: 1) Indikator kualitas sumberdaya manusia di bidang pengetahuan/teknologi dan pengamalan kongkrit nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 2) Indikator peningkatan ekonomi, kemakmuran negara tanpa monopoli berbasiskan teknologi tingkat tinggi (*high technology*) serta pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara benar oleh negara 3) Indikator peningkatan kualitas sektor pendidikan dan peningkatan kualitas jati diri bangsa melalui pengembangan budaya, adat istiadat serta mengedepankan pelayanan profesional gratis kesehatan masyarakatnya 4) Indikator peningkatan kualitas pertahanan semesta rakyat 5) Pemaksaan sistem *Reward* dan *punishment online*
2. **Manajemen Beragama dan Berkepercayaan Menurut TEC** adalah pengelolaan sebuah masyarakat yang memiliki agama dan kepercayaan yang sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing bahkan masyarakat yang C sekalipun.
3. **Manajemen Pendidikan** adalah sebuah proses untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa mulai dari PAUT sampai perguruan tinggi melalui sebuah sistem online yang di *support* oleh Negara dan subsidi silang.
4. **Manajemen Teknologi** adalah setiap masyarakat mampu menggunakan teknologi yang disediakan oleh Negara untuk melaporkan produktivitas kerja setiap bulan.
5. **Manajemen Terintegrasi dalam TEC** adalah sebuah mekanisme yang terpusat secara *online* di pemerintahan pusat sebuah negara yang dikendalikan oleh pusat namun setiap Propinsi, Kabupaten, Kota,

Kecamatan dan Desa memiliki sub pusat pengendali melalui jaringan internet.

6. **Mekanisme Struktur Pemerintahan Sistem Online** adalah sebuah mekanisme yang saling menguatkan antara satu titik jaringan pelaporan di struktur pemerintahan tingkat desa dengan titik lain di desa lainnya di seluruh wilayah negara.
7. **Menajemen Terintegrasi** adalah aliran semangat bangkit untuk berkarya bagi bangsa dan Negara serta umat manusia dari setiap warga Negara adalah sebuah keniscayaan atau kewajiban dalam sistem TEC ini.
8. **Pemerintah Pusat** adalah pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan arus informasi dan memantau serta melakukan tindakan eksekusi perbaikan secara terus menerus di bidang ekonomi, pendidikan, keamanan, administrasi, budaya, dan agama.
9. **Personal Utama** adalah pemimpin wilayah dan dibantu oleh enam tokoh yang diangkat sebagai mana dijelaskan di bab sebelumnya dengan honor yang besar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan mereka mendapatkan reward apabila mencapai target perolehan produktivitas diatas rata-rata yang ditetapkan oleh Negara sesuai kondisi wilayah masing-masing.
10. **Pertahanan yang Efektif** adalah memberdayakan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut untuk cinta tanah air dan membela negaranya dengan sistem tentara rakyat.
11. **SDA Dalam TEC** adalah bagian yang *urgen* untuk dikelola secara benar oleh Negara dan hanya demi kepentingan rakyatnya bukan segelintir orang atau kelompok apa lagi untuk kepentingan asing.
12. **Sistem Budaya dan Adat** adalah sebuah sistem dimana ketua adat

dan ahli budaya setempat diwajibkan untuk memimpin kelestarian budaya baik bahasa, tarian, pakaian, serta tatacara upacara adat dipertahankan dan diaplikasikan serta ditransformasikan kepada generasi muda yang ada di desatersebut.

13. Sistem Ekonomi TEC adalah merupakan kemauan serentak warga negara yang ingin bangkit secara ekonomi dan berkualitas secara SDM baik dari indicator pendidikan, budaya dan norma masyarakat internasional.

14. Sistem Pertahanan dan Anti Terorisme Menurut TEC adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara kondisi riil keamanan di sebuah desa dalam konteks tidak adanya kekacauan, pencurian dan minimalnya angka kriminalitas serta pengaruh atau serangan dari luar negeri atau pihak oknum dari desa lainnya atau di dalam desa itu sendiri yang membuat instabilitas keamanan.

15. Subsidi Ekonomi Antar Desa adalah sebuah proses transformasi ekonomi berupa bantuan ekonomi dari sebuah desa yang surplus kepada desa lain yang minus.

16. TEC Kerjasama Luar Negeri adalah mutlak harus dilakukan untuk menjaga stabilitas internasional dan pergerakan ekonomi yang berskala global dengan prinsip saling menguntungkan tanpa tekanan dan paksaan taranegara-negara yang bekerja sama tersebut.

17. TEC Kesehatan adalah tulang punggung yang penting bagi produktivitas kerja masyarakat dan aparaturnya Negara untuk selalu memperhatikan kesehatan yang berdampak jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memantau kesehatan setiap warga secara maksimal dan itu merupakan tanggung jawab Negara dalam melayani kesehatan masyarakat secara optimal tanpa memandang perbedaan

sikaya dan simiskin serta perbedaan lainnya.

18. Teori Ekonomi Cakti (TEC) adalah sebuah teori ekonomi kemanusiaan modern yang bertujuan untuk strategi mempercepat ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara material dan spiritual di sebuah negara serta upaya mencegah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan korupsi berbasiskan *Integrated Online Report* antar desa yang kemudian diteruskan ke kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan terpusat di ibukota negara sebagai pusat komando.

19. Tujuan TEC adalah diproyeksikan untuk membangun infrastruktur sistem ekonomi secara terpadu (bidang sumberdaya manusia, ekonomi, teknologi, agama, pendidikan, budaya, kesehatan, keamanan dan politik serta bidang lainnya yang penting) di sebuah negara yang memiliki struktur kelembagaan piramida terbalik di seluruh wilayah terkecil (desa) yang terkoneksi dengan *online report* secara *visual report* maupun dokumen online.

INDEKS

- Action, 14
Adpice, 14
Agamis, 26
Apresiasi, 22
Asset, 47
Cross Check, 13
Detector Live, 14
Detector Live, 15
Domestic, 34
Economic Gain.12
Eksekusi
E-KTP, 14
Elegan, 36
Evaluasi, 29
Festifal, 33
Hardcopy, 49
High Advanced Technology, 9
High Technology, 12, 53
Hire, 44
Homogent, 26
Income, 34
Indevenden, 28
Indicator, 6
Information Technology, 13
Infrastruktur, 7, 9, 10, 31,
Bertendensi, 10
Brain Drain, 44
Care, 50
CCTV, 16, 20, 30, 31
Check And Rechek, 51
Integrated Online, 6
Isme, 8, 27
Kapitalisme, 8, 27
Komunisme, 8
Kondusif, 6, 7, 18
Kredibilitas, 11
Kriminalitas, 6, 7, 14, 16, 30,
41
Lansia, 30
Legalitas, 30
Liberalis, 26
Liberalisme, 8, 27
Materiil Dan Spiritual, 6
Memorandum Of
Understanding, 44
Nasionalis, 26
Nepotisme, 26
New Coloniaslism, 44
Online Dan Mobile, 49
Online Report, 9

Religiusme, 27	Trouble, 12
Reward And Punishment, 6, 7, 8,15, 39, 42, 47, 50, 51	Trustet, 23
Sara, 35	UMKM, 6, 7, 28
Separatis, 30, 31, 53	Unlimited, 46
Separatisme, 30, 32, 38	Urgen, 19, 46
Server, 19, 20, 24	Visual Report, 9
Signal Internet, 49	
Signifikan, 13	
SimbiosisMutualisme, 14	
Software, 51	
Souvenir, 34	
StabilitasInternasional, 44	
Strata Sosial, 7	
Subsidi, 28	
Supcopy, 49	
Surplus, 7, 14, 28, 29, 37, 39, 44	
Tax Online, 12, 14	
Tec, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53	
Terintegrasi, 40	
Track record, 26	
Transfer Of Culture, 10	

SEKILAS PENEMU TEORI EKONOMI CAKTI



Cakti Indra Gunawan dilahirkan dari seorang Ibu yang luar biasa bernama Hj. Rr. Sri Rejeki dan memiliki seorang Ayah yang bijaksana bernama H. Mino (Pensiunan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto). Cakti dilahirkan pada Jum'at Pahing di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, pada tanggal 14 Mei 1971.

Penulis menamatkan pendidikan SD Negeri Krandegan I Banjarnegara, SMPN 1 Purwokerto, SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya, S2 Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Universitas Brawijaya dan melanjutkan S3 bidang Manajemen Migrasi Internasional atas dukungan beasiswa DIKTI dan Keith & Dorothy Mackay Postgraduate Scholarships di School of Business, The University of New England, Armidale, Australia lulus 2014.

Penulis adalah dosen di Universitas Tribhuwana Tungadewi, dan mengajar sebagai dosen Luar Biasa di Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada tahun 2016, penulis telah menghasilkan 10 (sepuluh) Buku Ajar untuk mahasiswa S1, S2, dan S3 serta 4 (empat) Jurnal Nasional, 3 (tiga) Jurnal Internasional. Di samping itu, penulis juga telah memiliki Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Departemen HAKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C00201100505 Tahun 2012 tentang penemuan baru

Teori Migrasi Internasional Berbasis Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pada tahun 2015 Penulis memperoleh predikat Pemenang Lomba Buku Ajar DIKTI dengan buku berjudul Strategi Manajemen Sumberdaya Manusia. Tahun 2017 mendapatkan predikat pemenang Penelitian Dosen Nasional PPT dengan judul Model Strategi Perbankan Syariah menghadapi MEA.

Penulis aktif di Seminar Nasional dan Konferensi Internasional untuk menjadi pemateri bidang Ekonomi dan Manajemen khususnya Manajemen Migrasi TKI di The University of New Castle (2012), The University of Western Sydney (2013),

The Australian National University (2013), The University of New England (2015). Penulis juga menjadi Ketua Jurnal Ekonomi dan Manajemen di Universitas Tribhuwana Tungadewi serta aktif membantu masyarakat untuk belajar bahasa Inggris gratis dan strategi memperoleh beasiswa kuliah di dalam dan luar negeri. Saat ini, penulis juga menjadi Direktur Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian dan Penerbitan bernama International Research and Development for Human Beings (IRDH) www.irdhresearch.com.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS

Nama : Cakti Indra Gunawan, SE., MM., PhD
Tempat/tgl lahir : Purwokerto, 14 Mei 1971
Alamat : Jl. Sokajaya 59 Purwokerto Jawa Tengah
Pekerjaan : Dosen Universitas Tribhuwana Tunggal
Malang, Dosen Universitas Brawijaya, Dosen
Universitas Muhammadiyah Malang, Direktur
International Research and Development for
Human Beings (IRDH)
Jabatan : Lektor IIIC
NIDN : 0714057101
Email : cakti.gunawan@gmail.com
HP/WA : 089621424412 / 085749547500

PENDIDIKAN

SDN Krandegan I Banjarnegara, lulus tahun 1983 SMPN I Purwokerto,
lulus tahun 1986
SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, lulus tahun 1989
S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, lulus tahun 1996 S2
Pascasarjana Universitas Brawijaya, lulus tahun 1998
S3 Faculty of Business, The University of New England, Australia, lulus
2014

KARYA BUKU

Nyanyian Hati Nurani , Universitas Negeri Malang Press, 2004
Teori Bintang: Filsafat, Manajemen dan Kemanusiaan, Bayu Media
Press, 2006
Protecting Indonesian Migrant Workers, The University of New England
Press, 2012
Ekonomi Makro, IRDH Press 2013

Etika Bisnis, IRDH Press, 2014

Sistem Informasi Manajemen, IRDH Press, 2014

Strategi Manajemen Sumberdaya Manusia, IRDH Press, 2015

Manajemen Investasi Berbasis Syariah, IRDH Press, 2016

Strategi Pemasaran UMKM, IRDH Press, 2016

Manajemen Produksi dan Operasional IRDH press, 2016

Human Resources Management based on Islam and Western View,
IRDH Press, 2016

TQM Pariwisata, UNITRI Press 2017

Teori Bintang: Sumber Kebajikan dan Ketenangan Manusia, IRDH Press
2017

JURNAL INTERNASIONAL

Protecting Migrant Workers and Human Trafficking: A case study in
Indonesia, Malaysia and Singapore, UNE Postgraduate, 2012

Language and Migrant Workers, UNM, 2013

Indonesian Migrant Workers in the Jokowi Era, IJAR 2015

Human Resources Management and Motivation on Small Business
Enterprise, 2017

PENEMUAN TEORI

Teori Manajemen Migrasi: Perlindungan TKI dan Pengembangan
Ekonomi, 2014.